

SERI

NO. 11

MEMORIA PASSIONIS

LAPORAN SUASANA KEMASYARAKATAN

DI

WILAYAH "PEGUNUNGAN BINTANG"

OLEH

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian

KEUSKUPAN JAYAPURA

**Jayapura
Februari 2002**

KEUSKUPAN JAYAPURA-SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian

KOTAK POS 1379

TEL: +62-967-534993

JAYAPURA 99013

FAX: +62-967-534993

PAPUA—INDONESIA

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

Jayapura, 16 Juli 2002

No. : 187/FK/02/3.4.8.

Hal : Laporan Pegunungan Bintang

Yang Terhormat

Pangdam XVII/Trikora

May.Jend.(TNI)Mahidin Simbolon
di JAYAPURA

Dengan hormat,

Menanggapi suasana keamanan yang dewasa ini meresahkan umat di wilayah Pegunungan Bintang, khususnya di Kecamatan Iwur dan Kecamatan Oksibil, maka pada kesempatan ini kami merasa perlu menyampaikan sebuah rangkuman laporan dengan judul : **MEMORIA PASSIONIS KE-11, LAPORAN SUASANA KEMASYARAKATAN DI WILAYAH "PEGUNUNGAN BINTANG"**.

Laporan ini pada intinya menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan bersama "oknum binaannya" berikut akibat yang ditimbulkan berupa ketakutan dan kecemasan yang melingkupi kehidupan umat di Kecamatan Oksibil pada akhir tahun 2001 dan awal tahun 2002. SKP pada saat itu membantu untuk memulihkan kembali keadaan dan mencapai suatu kesepakatan bersama dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Laporan mengenai kegiatan ini memang tidak diumumkan, walau laporan sudah tersusun pada bulan Februari 2002, mengingat tercapainya suatu penyelesaian yang memuaskan bagi segala pihak yang berkepentingan. Namun akhir-akhir ini sekali lagi persoalan yang sama muncul, dan dilaporkan oleh baik umat di Iwur dan Oksibil: lihat laporan singkat oleh petugas pastoral baik dari Iwur pada 18 Mei 2002 dan oleh warga masyarakat dari Oksibil pada 4 Juni 2002 yang pada kesempatan ini kami tambahkan pada laporan awal bulan Februari.

Karena persoalan menjadi aktual kembali kami sekarang menyampaikan laporan kami kepada Bapak Pangdam XVII/Trikora dan akan disampaikan kepada

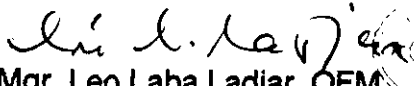
para anggota Muspida Propinsi Papua, serta jaringan kerja kami untuk diberikan perhatian seperlunya.

Kami merasa terdorong untuk membuka secara luas seluruh peristiwa berikut akibat yang terjadi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan, dapat mendorong adanya perbaikan suasana dimana masyarakat dapat hidup tanpa adanya tekanan dan rasa takut yang akhirnya melumpuhkan kehidupan umat yang sesungguhnya sudah lama mengalami penderitaan akibat kehadiran aparat keamanan dan juga aktivitas OPM di daerah tersebut.

Dengan disampaikannya laporan ini, maka kami mohon perhatian dan keterbukaan hati Bapak Panglima untuk menanggapi dan terlebih lagi memberikan kesempatan agar persoalan ini dapat didiskusikan secara bersama, guna terciptanya suatu penyelesaian yang secara nyata mampu memulihkan kembali keadaan umat atau masyarakat korban hingga ke tingkat yang paling rendah.

Demikian dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Teriring salam dan hormat kami,


Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM
Uskup Jayapura

Tembusan :

1. Pastor Paroki Iwur
2. Pastor Paroki Oksibil
3. Kelompok Peduli masyarakat di Oksibil

PENDAHULUAN

Pada tanggal 14-17 Januari 2002 SKP (Br. Theo van den Broek ofm dan Sdri. Frederika Korain SH) melakukan kunjungan ke Oksibil setelah menerima dua buah laporan dari Kelompok Peduli Masyarakat Oksibil. Laporan dimaksud berkaitan dengan suasana yang meresahkan masyarakat akibat sikap dan tindakan dari satuan TNI yang bertugas di sana.

Rangkuman isi kedua laporan adalah sbb.:

Masyarakat merasa tidak tenang setelah seorang pemimpin OPM yang pernah menyerahkan diri kepada pihak keamanan pada tahun 1998, berada lagi Mabilabol (pusat kecamatan Oksibil). Kehadirannya meresahkan masyarakat karena: [1] tidak jelas kedatangannya untuk apa?, [2] hubungannya dengan wakil-wakil masyarakat (a.l. Lembaga Adat Ngalum) dihindarinya; sedangkan [3] hubungannya dengan Kopassus setempat sangat erat; makan minum disitu, [4] dukungannya oleh Kopassus yang berpusat di Jayapura; menanggung perjalanannya; [5] kegiatannya berupa penyusunan suatu daftar penduduk kecamatan Oksibil yang pernah menjadi pengikut OPM; tidak jelas tujuannya; [6] disembarkannya ancaman bahwa enam tokoh masyarakat akan diculik dan dibunuh oleh Kopassus.

Sementara terjadi dua hal lain yang turut mewarnai suasana sekitar bulan November-Desember 2001 ini, ialah: [1] kehadiran Kopassus sejak awal tahun 2001; [2] pengambilan senjata oleh Kopassus di desa Yumakot pada tanggal 8 November 2001, dan [3] kunjungan kerja oleh Bupati Jayawijaya pada tanggal 18 Desember 2001.

Kehadiran Kopassus sebenarnya kurang diharapkan oleh masyarakat. Selama beberapa tahun mereka tidak hadir dan semuanya tenang saja; dengan adanya mereka, masyarakat sekali lagi merasa diawasi, diintai dan dikuasai.

Pengambilan senjata di Yumakot diadakan dibawah "kedok" pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat; rencana pengambilan senjata itu tidak dibuka sebelumnya atau dirundingkan dengan masyarakat atau wakilnya.

Kunjungan oleh Bupati menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk mengungkapkan isi hatinya; dalam hal ini Bp. Yohanes Karyabin selaku Wakil Ketua LMA Ngalum menyuarakan keprihatinan masyarakat atas perkembangan seperti disebutkan di atas: [1] kegiatan oleh mantan pemimpin OPM, ialah pendataan atas penduduk kecamatan Oksibil – daftar khusus sebanyak 560 orang; [2] kegiatan Kopassus, termasuk pengambilan senjata, serta kegiatan pengintaian waktu malam; dan [3] terdapat ancaman terhadap enam tokoh masyarakat akan diculik dan dibunuh. Sebagai aspirasi dasar dinyatakan oleh Wakil Ketua LMA Ngalum bahwa masyarakat sebenarnya mau hidup dalam ketenangan, dan seandainya ada instansi yang ingin menjalankan sesuatu, alangkah baiknya kegiatannya dikoordinasikan dengan Lembaga Adat sebagai wakil resmi masyarakat.

Ternyata pengungkapan aspirasi masyarakat tadi menjadi alasan bagi Kopassus untuk meminta keterangan lanjut, sedangkan pengungkapan pendapat selama kunjungan Bupati dipakai oleh mantan pemimpin OPM untuk mulai menyebarkan ancaman terhadap enam tokoh masyarakat (akan diculik dan dibunuh), maka sejumlah tokoh masyarakat mulai menyembunyikan diri dan masyarakat pada umumnya merasa resah.

Dalam keadaan resah ini masyarakat meminta SKP untuk mendatangi mereka dan meneliti keadaan di tempat sampai membantu mencari jalan keluar, hingga masyarakat dapat hidup kembali dalam ketenangan.

Selama berada di Mabilabol, SKP telah mengadakan pertemuan dengan para pihak yang sekiranya perlu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan yang diberikan oleh Kelompok Peduli. Pertemuan pertama dilakukan dengan ke-6 orang warga yang menurut laporan diancam akan diculik oleh satuan Kopassus Pos Oksibil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pertemuan ini, diputuskan agar keesokan harinya SKP dan para pastor melakukan pertemuan dengan Pos Kopassus dan satuan-satuan TNI lainnya. Direncanakan pertemuan juga mau dilakukan dengan institusi sipil yang ada, namun umumnya hanya ada berupa gedung tanpa pegawai. Sedangkan pada hari terakhir kunjungan kami, diadakan pertemuan gabungan antara masyarakat dan pihak keamanan guna saling mendengar pendapat serta perasaannya.

Dalam laporan ini kami akan memberikan perhatian kepada:

- KONDISI UMUM DI KECAMATAN OKSIBIL
- PEROBAHAN SUASANA SEUSAI LAPORAN SKP 1999
- KEDUDUKAN PERSOALAN PADA AKHIR TAHUN 2001
 - Pendapat serta perasaan masyarakat
 - Pendapat serta perasaan pihak keamanan
 - Beberapa kesimpulan
- PERTEMUAN GABUNGAN: MASYARAKAT dan PIHAK KEAMANAN
 - Mendengar pendapat
 - Pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat
 - Komitmen bersama
- TINDAK LANJUT
 - Pertemuan dengan Kepala Kopassus di Jayapura
 - Pertemuan dengan mantan pemimpin OPM, Anton
- KESIMPULAN

1. K O N D I S I U M U M

Mabilabol sebagai ibu kota Kecamatan Oksibil, dihuni oleh kurang lebih 1300 jiwa, sedangkan seluruh kecamatan dihuni oleh 7.668 penduduk¹. Selain Gereja Katolik dan GKI, sejumlah instansi pemerintah baik sipil maupun militer memiliki kantor di Mabilabol diantaranya: kantor kecamatan, Puskesmas, Pensip, Pos Kopassus (4 orang anggota -awalnya 6 orang, 2 diantaranya sudah ditarik ke Jayapura), Kantor Koramil dari Kodim 1702 Wamena, Pos Yonif 725 dari Sulawesi Tenggara dengan 17 orang personil yang diperbantukan pada Koramil Oksibil, gedung SD dan SMP Katolik maupun SMP Negeri Mabilabol.

Sekilas tentang keberadaan institusi-institusi dimaksud dan kegiatannya akan dijelaskan dibawah ini.

[a] Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Beberapa menit setelah tiba di Mabilabol, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke sejumlah tempat dalam ibu kota kecamatan yang penuh dengan 'kolam alam' ini.

Tampak kelompok ibu-ibu sedang berkumpul di Puskesmas Mabilabol yang rupanya hari tersebut merupakan hari imunisasi bagi para bayi. Kegiatan Puskesmas dilayani oleh sejumlah perawat namun tanpa dokter Puskesmas yang menurut informasi tidak pernah ke Mabilabol alias 'berkantor' di Wamena.

Selain itu, di bidang pendidikan keramaian sedikit terdengar dari suara para murid asal SD YPPK dan SMP YPPK Mabilabol. Jadwal belajar di kedua sekolah inipun sudah berjalan hampir sebulan, umumnya dengan satu-dua orang guru mengingat para guru lainnya belum kembali dari liburan Natal dan Tahun Baru.

Salah satu pertanyaan kritis

Perlu dipertanyakan kenapa pemerintah tidak berdaya untuk menggerakkan tenaga medisnya dan tenaga pengajarnya sampai memberikan pelayanan sewajarnya kepada wilayah yang relatif terisolir?

[b] Kegiatan Pemerintahan

Suasana yang sungguh ironis terlihat pada kantor kecamatan yang hanya 'dihuni' oleh rerumputan dan serangga. Bangunan yang menurut masyarakat didirikan dengan dana puluhan juta ini, nampak sudah ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama, terlihat dari keadaan kantor yang kotor dan hampir setiap sudut bangunan sudah lapuk hingga hancur. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat, pastor paroki maupun aparat pemerintahan lainnya, Camat (Drs. Achmat Panjaitan) lebih banyak – hampir melulu - menetap di Wamena. Beliau

¹ Sensus Penduduk tahun 2000

datang ke Mabilabol hanya satu-dua hari, setelah itu kembali lagi ke Wamena, layaknya melaksanakan program kunjungan singkat ala birokrat di tanah Papua ini. Bahkan lasimnya camat harus berada di tempat tugas pada saat adanya kunjungan kerja oleh seorang atasan; namun di Oksibil terjadi fenomena lain dimana sang camat tidak berada di tempat sewaktu Bupati Jayawijaya melakukan kunjungan ke Mabilabol pada tanggal 18 Desember 2001.

Absennya sang pemimpin di kantor dengan alasan yang tidak jelas, dengan sendirinya menjadi alasan bagi staf kecamatan untuk turut 'menghilang' dari tugas walau tidak mengurangi rasa hormat terhadap satu-dua orang staf yang masih setia menjalankan tugas dalam keterbatasan yang ada. Tidak jelas juga apakah fungsi kontrol dan sanksi dijalankan dalam kasus semacam ini mengingat suasana demikian sudah berlangsung lama.

Salah satu pertanyaan kritis

Kenyataan kevakuman pemerintah sipil setempat lebih perlu dipertanyakan lagi mengingat bahwa wilayah Oksibil sedang disiapkan menjadi Kabupaten. Bagaimana mau mengajak masyarakat untuk menghargai pemerintah serta percaya pada niat baik dalam suasana semacam ini???

Suasana pemerintahan yang vakum seperti diatas yang senyatanya sungguh merugikan kepentingan masyarakat, perlu diangkat dan dilaporkan untuk menjadi perhatian pemerintah di tingkat teratas agar ada perbaikan berarti demi terwujudnya pelayanan oleh aparat yang merupakan bagian dari hak masyarakat.

Selain untuk memenuhi kepentingan pelayanan kepada masyarakat, langkah tersebut bermanfaat pula dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang berdaya guna dalam era otonomi yang sedang berjalan, maupun sebagai upaya preventif dalam melindungi masyarakat dengan menghindari praktek yang sama pada era pembangunan dalam kabupaten baru yang sedang dirancang bagi masyarakat Ngalum/Pegunungan Bintang.

[c] Aparat Keamanan

Kegiatan yang menonjol ditunjukkan oleh satuan TNI khususnya oleh Pos Kopassus dan Pos Yonif 725. Sedangkan kantor Koramil sendiri diisi oleh pasukan yang baru diganti pada akhir Desember lalu dan Danramil yang sedang berada di Wamena. Sejumlah kegiatan yang dilakukan diantaranya, pengaspalan lapangan terbang Mabilabol yang melibatkan anggota Kopassus dan pembuatan kebun percontohan serta program pengobatan kesehatan kepada masyarakat yang diadakan oleh pasukan Yonif. Agenda-agenda tersebut diatas telah selesai sehingga aparat TNI ini terlihat santai di posnya masing-masing. Merekapun berupaya mencari kesibukan lain dengan :

- Seringkali mengadakan hiburan Yosim/disko semalam suntuk yang melibatkan muda-mudi Mabilabol (beberapa kasus antara tentara dan muda-

mudi maupun antara muda-mudi sendiri terjadi di tempat yosim ini seperti yang diungkapkan dalam pertemuan dengan kaum ibu²).

- Mengumpulkan barang-barang yang bernilai ekonomis yang kemungkinan dengan maksud diperjual-belikan atau dijadikan hadiah. Seperti yang sempat kami amati di Pos Yonif, beberapa pasukan sibuk mengawetkan sejumlah burung Cenderawasih.
- Informasi dari masyarakat, aparat TNI aktif dalam mengumpulkan kayu gaharu dari masyarakat yang selanjutnya dijual di Jayapura atau di luar Papua.

Sedangkan mengenai kepolisian, tidak banyak informasi yang kami dapatkan selain sempat melihat salah seorang anggota dari Polsek Oksibil yang hadir pada saat pertemuan umum antara tokoh masyarakat dan Kopassus pada tanggal 16 Januari 2002. Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian de facto tidak ada, entah kenapa?

Salah satu pertanyaan kritis

Dengan tidak aktifnya kegiatan pemerintahan sipil, praktis aparat keamanan mengambil alih peran tersebut dengan caranya sendiri yang kadang kala bersinggungan dengan perasaan dan kepentingan masyarakat hingga pada tingkat dimana tindakan aparat kadang tidak diterima oleh warga. Kondisi demikian berpotensi tinggi dalam menimbulkan konflik selain hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tidak terpenuhi yang dikuatirkan menggiring masyarakat menjadi kembali hidup dalam suasana buram seperti dimasa silam. Kenapa keadaan demikian dibiarkan oleh pemerintah sipil?

[d] Peranan Kelompok Peduli Masyarakat serta Lembaga Adat

Seusai pelatihan HAM dan Analisa Sosial sebagaimana dijalankan oleh SKP pada tahun 2000 (baik di Oksibil, dan di dua kecamatan tetangga: Okbibab dan Kiwirok) telah dibentuk satu Kelompok Peduli Masyarakat Oksibil (KPMO). Kelompok ini ternyata mulai mengambil peranan dan menjadi tempat perundingan mengenai sejumlah perkembangan di wilayah kecamatan ini. Hal yang sama dapat dikemukakan berhubungan dengan berfungsinya suatu Lembaga Adat. Kedua lembaga ini dinilai oleh masyarakat sebagai "wakil-wakil" yang sah. Selama dua tahun terakhir ini kedua lembaga ini telah berupaya untuk menjamin suasana aman di kecamatan ini. Suatu upaya yang sangat menarik terlihat sewaktu mereka berupaya untuk mensosialisasikan hasil Kongres Papua II (Mei-Juni 2000 di Jayapura). Pada kesempatan itu mereka mengundang para mantan-pemimpin OPM untuk turut menjaga keamanan, dan menyerahkan segala atribut perjuangan mereka, termasuk sejumlah senjata yang masih dipegang atau disembunyikan di tengah-tengah masyarakat. Dapat disesali bahwa ajakan ini kurang diberikan respons oleh para mantan-pemimpin OPM, entah kenapa? Pada dasarnya kedua lembaga membuka diri untuk berdialog dengan pihak siapa saja yang berada di kecamatan ini, guna memperoleh suatu

² Lihat lampiran: Pertemuan bersama Kaum Ibu, tgl. 16 Januari 2002 (arsip SKP Jayapura).

koordinasi yang konstruktif membangun masyarakat setempat dan menjamin kesejahteraan serta ketenangan hidupnya.

Salah satu pertanyaan kritis

Mengingat vakuum pemerintah sipil, dan peranan konstruktif kedua lembaga kemasyarakatan yang disebut di atas, perlu dipertanyakan kenapa justru kedua lembaga ini menjadi sasaran ancaman dari pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?

2. P E R O B A H A N P A S C A L A P O R A N S K P 1 9 9 9

Suatu "flash back"

Laporan SKP pada tahun 1999 (bulan Juli)³ menarik perhatian pada "Dampak Kehadiran Aparat Keamanan di Wilayah Pegunungan Bintang". Sejumlah kejadian dilaporkan, dan kemudian dirumuskan sejumlah kesimpulan berdasarkan fakta-fakta itu. Rangkuman kesimpulan kami cantumkan dibawah ini sbb.:

1. Aparat keamanan melayani kepentingan siapa?

Sejak wilayah Pegunungan Bintang menjadi Daerah Operasi Militer hingga pencabutannya secara resmi tgl. 5 Oktober 1998, kehadiran pasukan militer non-organik di wilayah itu tidak mengalami perubahan berarti. Kehadiran militer (teritorial maupun non-organik) terbukti melahirkan serangkaian fakta negatif. Kehidupan masyarakat desa di Wilayah Pegunungan Bintang tidak berkembang sewajarnya. Mengapa? Karena aparat keamanan senantiasa bertindak seolah-olah sebagai pusat kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga pemerintahan.

Seandainya masyarakat didudukkan sebagai pusat kehidupan desa, maka aparat keamanan akan memberikan informasi transparan mengenai apa yang terjadi; mengadakan musyawarah dengan masyarakat pada jam kerja berdasarkan perencanaan yang jelas; mengambil langkah berdasarkan kehendak dan keputusan masyarakat; dan menghormati identitas diri orang Ngalum: adat, kebiasaan, pola pergaulan, keyakinan religus. Fakta yang terjadi sebaliknya: setiap saat masyarakat diwajibkan mengadakan rapat; dengan penuh risiko, masyarakat disuruh mencari senjata ke negara tetangga (PNG); berkali-kali masyarakat dikondisikan untuk mengadakan yossim sepanjang malam; masyarakat dipaksa menandatangani surat pernyataan; masyarakat diperbodoh dengan meniupkan isu-isu politis yang meresahkan.

Di sisi lain, seandainya aparat keamanan berlaku sebagai alat pemerintah, maka ia tunduk di bawah struktur pemerintah daerah: bertindak atas dasar perintah dari aparat pemda (Camat) atau mengambil inisiatif sejauh telah dibicarakan dengan pihak pemerintah daerah setempat. Senyatanya, pihak aparat keamanan mengambil alih peran pemerintah daerah yang mengatur kehidupan

³ Lihat: Memoria Passionis No. 5 yang berjudul: "Dampak Kehadiran Aparat Keamanan bagi situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang Tahun 1998 - Awal 1999", oleh Sekretariat Keadilan & Perdamaian, Keuskupan Jayapura. Jayapura, Juli 1999.

masyarakat; bahkan membawahi aparat pemerintah daerah yang sah tanpa alasan hukum yang memadai.

Dengan demikian fakta-fakta menyatakan bahwa sebenarnya kepentingan masyarakat tidak dihiraukan. Aparat keamanan ternyata melayani kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa yang seharusnya didahulukan. Malah tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah yang sah, diambil alih begitu rupa. Apakah hal ini bukan merupakan sebuah arogansi kekuasaan?

2. Politisasi kehidupan masyarakat desa

Politisasi kehidupan masyarakat desa terjadi saat isu-isu bermuatan politis secara tiba-tiba muncul di tiga tempat berbeda di wilayah Pegunungan Bintang tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam bulan Juli-Agustus 1998 warga masyarakat tiba-tiba menjadi aktif bergerak dalam rapat-rapat untuk membicarakan masalah ancaman OPM, kemerdekaan Irija, pernyataan mendukung pemerintah. Konsentrasi masyarakat yang biasanya tercurah pada pekerjaan di kebun tiba-tiba dialihkan ke masalah-masalah yang bermuatan politis yang dilontarkan oleh pihak aparat keamanan. Dengan perpindahan konsentrasi perhatian masyarakat ini, situasi normal kehidupan masyarakat desa cukup terganggu. Situasi ini cukup meresahkan kehidupan masyarakat desa seluruhnya karena muncul kembali kecurigaan satu sama lain; masyarakat desa dikondisikan untuk masuk dalam situasi genting dan terancam; masyarakat desa digerakkan sedemikian rupa sehingga konsentrasi pada kehidupan harian hilang. Ironisnya, keresahan ini justru datang dari aparat keamanan yang membawa isu-isu bermuatan politis dan menggerakkan masyarakat desa untuk menanggapi.

3. Rusaknya sendi-sendi terdalam kehidupan masyarakat

Dalam proses perkembangan masyarakat, unsur keluarga dan pendidikan ambil peran yang menentukan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat Ngalum yang tekun membangun hidup dengan meningkatkan bobot hidup berkeluarga serta mempersiapkan masa depan anak-anak dengan pembinaan mental-kerohanian dan pendidikan formal (sekolah) yang memadai. Proses ini pada mulanya cukup berjalan normal dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam tahun 1998 s.d awal 1999, proses ini mengalami gangguan yang cukup hebat, khususnya di lingkungan Abmisibil.

Sebagai konsekuensi logis dari dampak pertama di atas, maka keluarga-keluarga Ngalum telah terkondisi untuk hidup di bawah tekanan kekuasaan. Keluarga-keluarga itu tidak bisa menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Empat unsur utama dalam keluarga diganggu dan bahkan dalam taraf tertentu dirusak: [1] ritme kehidupan keluarga, [2] tata pergaulan pria-wanita, [3] hubungan antar anggota keluarga, dan [4] pembinaan anak di rumah, ditambah lagi salah satu unsur umum: [5] sistem pendidikan sekolah macet.

Pertama, ritme kehidupan keluarga diganggu karena keluarga-keluarga dipaksa untuk hidup menurut agenda politis. Masalah-masalah politis yang sebenarnya diluar jangkauan keluarga dipaksa masuk dan menentukan jalannya hidup keluarga-keluarga di tiga tempat di wilayah Pegunungan Bintang. Kaum laki-laki yang sehari-hari bisa bekerja di kebun untuk mencukupi kebutuhan keluarga dipaksa beralih ke isu-isu politis yang melelahkan dan menyita perhatian.

Kedua, rusaknya tata pergaulan pria-wanita akibat praktik hubungan seks bebas. Dalam tata budaya Ngalum, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diatur dengan cermat sehingga hubungan-hubungan yang mengarah pada tindakan seksual hanya diperkenankan dalam rangka perkawinan. Dalam tahun 1998-awal 1999 pola ini dirusakkan akibat berbagai acara dansa dan *yossim* yang sudah dilarang baik oleh Gereja maupun adat karena mengarahkan orang pada tindakan seks asusila. Ironisnya, aparat keamananlah yang mengadakan acara-acara dansa dan *yossim*. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat unsur-unsur yang mencolok dalam persoalan ini: pihak pengundang adalah aparat keamanan; tamu undangan terbatas pada kelompok perempuan dan sejumlah pegawai; tidak ada perundingan lebih dulu dengan pihak pemerintah setempat, petugas Gereja, ataupun tokoh-tokoh adat; acara ini berlangsung berulang-ulang; adanya ancaman terhadap para orang tua yang melarang anak perempuannya mengikuti pesta-pesta dansa; termasuk juga intimidasi terhadap Kepala Sekolah SMU yang mencoba untuk menempatkan acara pesta dansa dalam proporsinya yang tepat.

Ketiga, hubungan antar anggota keluarga menjadi kacau karena anak tidak lagi ikut pendidikan orang tua dan malah orang tua terancam oleh kekerasan aparat keamanan jika melarang anak-anak perempuannya ikut acara pesta dansa. Ikatan suami-istri yang dijaga dan dijunjung tinggi oleh budaya Ngalum dan agama manapun, rusak karena sejumlah istri terlibat dalam hubungan seks asusila dengan oknum-oknum aparat keamanan. Ikatan yang juga dinilai luhur oleh semua agama resmi diabaikan begitu saja. Hubungan antara fam suami dengan fam istri juga mengalami gangguan serius akibat konflik-konflik yang terjadi dalam

keluarga inti meluas ke fam-fam yang bersangkutan. Persoalan yang sebenarnya terjadi antara aparat keamanan dengan masyarakat berubah menjadi persoalan intern masyarakat.

Keempat, pembinaan moral anak-anak, khususnya anak-anak perempuan yang berangkat dewasa mengalami sejumlah kesulitan serius. Anak-anak perempuan itu begitu tersedot perhatiannya pada keramaian pesta-pesta dansa. Acara dansa yang dalam adat dimengerti sebagai tahap menuju perkawinan diperkurus maknanya hingga menjadi acara hiburan semata-mata. Tarikan perhatian ini menjadi lebih kuat karena pihak yang mengadakan acara dansa adalah aparat keamanan yang memiliki kekuatan memaksa. Karena itulah para orangtua, khususnya di Abmisibil, tidak berdaya lagi mengarahkan perilaku moral anak-anaknya sendiri. Orangtua juga sulit memberikan teladan yang baik karena hidup mereka sendiri telah dirusakkan oleh perilaku asusila dari sejumlah oknum aparat keamanan. Campur tangan aparat keamanan--meski tidak selalu dilakukan secara langsung--begitu menekan praktik kehidupan keluarga.

Kelima, selain terhadap pendidikan di rumah, aparat keamanan mengambil peran yang begitu besar dalam hambatan bahkan kerusakan sistem pendidikan sekolah yang ada di Abmisibil. Gangguan, ancaman, dan intimidasi datang dari aparat keamanan tidak hanya kepada para siswa, guru (kepala sekolah), dan orangtua murid tetapi bahkan langsung kepada sistem pendidikan sekolah. Berulang kali sistem belajar-mengajar di SMU dikacaukan dengan kegiatan yossim dan dansa yang diatur oleh oknum-oknum aparat keamanan demi kepentingan oknum-oknum tersebut.

Karena akibat yang ditimbulkan sungguh serius, pantas dipertanyakan mengapa aparat keamanan meniupkan isu-isu politis ke dalam ritme hidup keluarga? Mengapa aparat keamanan tetap melakukan pesta-pesta dansa berulang kali meski adat dan Gereja melarangnya demi pertimbangan moral? Mengapa dipakai cara-cara paksaan dan intimidasi bagi mereka yang mencoba menyuarakan kebenaran? Apakah mungkin semuanya ini hanyalah tindakan spontan dari sejumlah oknum?

4. Pelestarian rasa takut yang melumpuhkan

Dampak yang paling fundamental: dengan sederetan peristiwa itu semakin dilestarikanlah rasa takut yang sudah tertanam sejak daerah Pegunungan Bintang menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Peristiwa yang merésahkan, mencengkam, bahkan menakutkan masyarakat kembali dialami. Rasa takut itu

disebut 'melumpuhkan' karena individu, keluarga, dan sistem-sistem pengatur kehidupan masyarakat menjadi tidak berdaya. Individu dibuat tidak berdaya karena setiap tindakannya begitu diintervensi oleh kemauan aparat keamanan. Keluarga dibuat tidak berdaya karena hubungan antar anggota keluarga, ikatan suami-istri, pola pendidikan di dalamnya dirusak hingga tidak bisa berkembang wajar. Sistem-sistem yang menjalankan kehidupan masyarakat biasa juga tidak berjalan wajar: masyarakat begitu saja diwajibkan untuk mengadakan rapat-rapat; tata pergaulan pria-wanita dirusak; ritme hidup sehari-hari didominasi oleh isu-isu politis yang ditiupkan dari pihak luar. Dengan luas dan dalamnya jangkauan rasa takut ini, maka masyarakat sungguh tidak mampu mengembangkan dirinya dan merencanakan hari depannya yang lebih sejahtera. Mengapa justru aparat keamananlah yang mendatangkan kelumpuhan ini?

Walau isi laporan SKP ini ditanggapi oleh Pimpinan Kodam XVII Trikora, Mayor Jenderal Amir Sembiring, dengan menyatakan bahwa "laporan HAM dibuat-buat saja", akhirnya beliau dapat diyakinkan bahwa laporan ini betul berdasarkan fakta. Maka pimpinan Kodam XVII Trikora akhirnya bersedia untuk mengirim suatu tim pemeriksaan kebenaran laporan SKP. Hasil pemeriksaan ternyata membenarkan laporan SKP dan kesimpulan demikian disampaikan oleh May. Jen Amir Sembiring dalam suratnya kepada Keuskupan Jayapura⁴. Maka Pangdam menindaklanjuti penelitian ini dengan a.l. menarik unit Kopassus keluar dari wilayah Oksibil.

Ternyata hasil penelitian oleh Kodam membawa dampak yang positif dan selama kurun waktu akhir tahun 1999 sampai akhir tahun 2001 masyarakat Oksibil dapat hidup dalam suatu ketenangan yang menyegarkan. Suasana demikian mulai diganggu kembali pada akhir tahun 2001.

⁴ Surat yang bernomor K/219/TX/1999, tertanggal 30 September 1999, yang ditandatangani oleh Amir Sembiring selaku Panglima Kodam XVII Trikora. Teks lengkap, lihat lampiran.

3. KEDUDUKAN PERSOALAN PADA AKHIR 2001

3.a. Pendapat serta perasaan masyarakat

Guna memperoleh suatu gambaran mengenai keadaan serta suasana kemasyarakatan SKP – selama kunjungannya - mengajak sejumlah tokoh masyarakat – diantaranya yang sedang terancam diculik dan dibunuh - untuk memberikan informasi; yang diundang (dan hadir) adalah anggota masyarakat, yakni: Tonny Oktemka (Guru), Yohanis Kakyarmabin (Sekum LMA Ngalum /Kandepdiknascam), Christoforus M. Uropdana (Guru/Kepala Desa Yapimakot), Yosep Sasaka, Feliks B. Uropdana, Yohanes Sasaka (Guru), - semua menjadi sasaran ancaman - ditambah dengan Fabianus Kakyarmabin (adik Yohanis Kakyarmabin, saksi atas kedatangan Kopassus ke rumah Yohanis). Salah seorang yang turut diancam, namun tidak sempat hadir, ialah Engel Uropmabin (Ka. Puskesmas Mabilabol).

Yang hadir pula: pastor Paroki Oksibil, Rm. Willem Sinawil Pr. dan pastor Paroki Iwur (paroki tetangga), Rm. Julianus Mote Pr.

Pertemuan ini bertujuan mengklarifikasikan kembali informasi-informasi yang tertera dalam surat dengan kondisi di lapangan.

Jika dimengerti dari laporan, perubahan suasana masyarakat di Oksibil terjadi sejak kedatangan Sdr. Anton Kasipmabin (Mantan anggota OPM) dari Jayapura ke Oksibil pada bulan Oktober 2001. Yang menjadi alasan keresahan dapat dirangkumkan sbb.:

- Kedatangannya ke Oksibil dengan misi yang tidak jelas.
- Sudah 27 tahun meninggalkan kampung dan menjadi anggota OPM yang *notabene* adalah musuh TNI; tapi kenyataannya selama di Oksibil sehari-hari Anton tinggal di markas Kopassus.
- Masyarakat mendengar bahwa dirinya sudah menyerah, namun berhubungan erat dengan Kopassus.
- Tanggal 8 November 2001, bersama Kopassus mengambil senjata di Yumakot.
- Melakukan pendaftaran terhadap nama-nama anggota masyarakat Oksibil yang dianggap mantan anggota atau pengikut dari Sdr. Paulus Kaladana (pimpinan TPM/OPM yang sudah menyerahkan diri dan sekarang berada di wilayah Batom dan Yapsi) dengan tujuan akan mendapatkan bantuan rumah sehat/rumah sosial. Namun dalam daftar yang sudah disusun, terdapat nama-nama warga yang sebenarnya merupakan masyarakat biasa yang tidak tahu-menahu dengan gerakan OPM yang dipimpin oleh Sdr. Paulus Kaladana ataupun Anton Kasipmabin.

- Menyebarkan ancaman terhadap tokoh-tokoh yang dinilai mendukung "M" termasuk 50 orang pengurus LMA Ngalum-Kupel, diantaranya : Antonius Oktemka, Engel Uropmabin, Yosep Sasaka, Kristoforus Uropdana, dll.
- Anton sebelumnya melakukan kegiatan di Tabubil (pemukiman TPN/OPM), namun diduga pindah dan bergabung dengan Sdr. Paulus yang bermarkas di Yapsi, Batom dan keduanya kemudian sama-sama menyerah kepada Kopassus dan bekerja sama.
- Pengungsi dari perbatasan sebanyak 10 kepala keluarga yang saat ini bertempat tinggal di bekas kamp PT In-Gold di Mabilabol, tidak diakui oleh Anton sebagai pengikutnya namun nama mereka terdapat juga didalam daftar yang disusun Anton.
- Paulus dan Anton sebenarnya tinggal di Batom, namun sering ke Jayapura hingga muncul pertanyaan: siapa memungkinkan perjalanan mereka dua?

Sejumlah hal dirincikan lebih lanjut lagi sbb.:

Sekitar soal "misi Sdr. Anton" dan pendaftaran nama

- 14 November 2001, Sdr. Anton datang ke rumah Yohanes Kakyarmabin, wk Ketua LMA Ngalum untuk menyampaikan tujuan kedatangannya ke Oksibil yaitu, untuk membuat sensus penduduk dalam rangka program bantuan rumah sosial. Tambahnya bahwa data tersebut akan dilaporkan kepada pihak atas melalui pimpinan Kopassus di Jayapura. Dalam pertemuan yang sama Sdr. Anton memberitahukan bahwa dirinya akan melanjutkan "kegiatan yang lalu". Kemudian Bp. Yohanis minta laporan tentang perjalanan Sdr. Anton ke Jayapura. Ia memberi jawaban secara kiasan bahwa "Yang pertama adalah anak kandung pertamanya". Dengan demikian, pernyataannya mengandung makna bahwa masih ada kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya.
- Beberapa ungkapan lain dapat dicatat sbb.: "siapa saja yang mau mencari tahu kegiatanku (pengambilan senjata), Oksibil akan menjadi danau darah". Menurut Sdr. Anton, Kopassus mau membantu masyarakat memajukan pembangunan di Oksibil. Sedangkan Keberadaan Pos pasukan 725 dari Baroagi, Sulawesi Tenggara (yang diperbantukan pada pos Koramil 1702 di Oksibil) hanya mau 'makan masyarakat'. "Kamu sebagai tokoh masyarakat, gampang sekali bernasip sama dengan alm. Theys. Theys yang tinggal di kota saja bisa dihilangkan apalagi kamu yang berada di kampung seperti ini".
- Tanggapan dari Bp. Yohanes, sensus penduduk harus dilakukan secara resmi dengan perintah dari negara melalui badan statistik wilayah.
- Terdapat 560 orang yang terdaftar.
- Setelah membaca daftar, Bp. Yohanes menyatakan protes atas beberapa nama diantaranya adalah warga yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kegiatan OPM yang dilakukan oleh Paulus maupun Anton.
- Bagi Sdr. Anton, kegiatan tersebut merupakan "proyek". Namun masyarakat menilainya sebagai pertanda akan terulang kembali pengalaman pahit yang sudah dialami sekian tahun lalu : penangkapan, pemeriksaan, penyiksaan hingga hilangnya nyawa.

Sekitar soal pengambilan senjata di Yumakot

- Menyangkut pengambilan senjata di kampung Yumakot pada 8 November 2001, diprotes oleh Bp. Yohanes selaku Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngalum. Dinilai sebagai aksi gelap yang mau menjual masyarakat. Mengingat bahwa pada saat sosialisasi hasil Kongres Papua 2000, LMA Ngalum sebenarnya telah mengirim undangan kepada para tokoh Ngalum termasuk dari kelompok *garis keras* seperti OPM yang dipimpin oleh Paulus dan Anton agar datang dan menyerahkan alat-alat (yang hanya mengundang terjadinya tindak kekerasan) kepada LMA dengan disaksikan oleh gereja, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Sosialisasi dilakukan pada bulan Juli 2000, namun undangan LMA pada para pemimpin OPM tidak digubris.
- Undangan ini tidak ditanggapi oleh Anton, dkk. yang malah menyatakan membubarkan diri didepan Kopassus di Batom, bukan didepan masyarakat Ngalum. Anggotanya justru pulang ke kampung halaman dengan penuh ketakutan, tetapi difasilitasi oleh LMA untuk kembali menjalani hidup yang normal bersama masyarakat lainnya. Sehingga persoalan seputar benda-benda yang mengundang tindak kekerasan semisal senjata, dianggap sudah selesai. Jika ada anggota masyarakat yang masih menyimpan, merupakan tanggung jawab pribadi, bukan masalah dari orang Ngalum secara keseluruhan.

Sekitar soal pengawasan oleh pihak Kopassus

- Kopassus pernah melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat tentang anggota Kongres Papua 2000, anggota Satgas Papua, badan pengurus LMA Ngalum, pada rentang waktu sesudah Kongres Papua 2000 dan sebelum Anton datang ke Oksibil. Ada juga kaos Satgas Papua yang dibakar. *Tidak disebutkan secara jelas kapan Kopassus melakukan aksi-aksi diatas.*
- Terhadap pemeriksaan atribut Papua pernah dijelaskan kepada Danpos Kopassus Sdr. Lilik Hendarto yang bertamu ke rumah Tony Otemka bahwa, "pemeriksaan atribut Papua jangan ke masyarakat, tanyakan saja pada saya karena hal tersebut (bendera Bintang Kejora, kartu Satgas Papua, lagu, hasil Kongres Papua) sudah dikumpulkan dari masyarakat dan saya sedang menyimpannya". Pak Tonny menawarkan dialog yang melibatkan berbagai pihak terkait di Oksibil untuk menyelesaikan soal tersebut.

Sekitar soal sejarah perjuangan serta hubungan dengan Kopassus

- Tahun 1999, Sdr. Paulus Kaladana, Sdr. Anton Kasipmabin dan Sdr. Agus Kapropka bekerja sama dengan Kopassus mau menjual kayu gaharu ke Jayapura. Kayu gaharu dibawa dari Yapsi, yang merupakan markas dari Sdr. Paulus.
- M (merdeka) merupakan 'harga mati' bagi masyarakat Ngalum. Sdr. Paulus c.s justru mendukung Otonomi sehingga ada lapangan terbang yang dibangun di Batom.

- Sdr. Anton, dkk terlihat hadir dalam lokakarya tentang pembangunan di Pegunungan Bintang yang diadakan bulan September 2001 di Jayapura dengan dikawal oleh anggota Kopassus.
- Sdr. Anton berjanji bahwa akan ada pembangunan jalan, rumah dan perkantoran di Oksibil.
- Tanggal 15 Desember 2001 Sdr. Anton melakukan pembicaraan dengan Sdr. Paulus di Batom melalui SSB Pemda, melaporkan kegiatannya selama berada di Oksibil.
- Sdr. Anton menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal pengungsi yang bertempat tinggal di eks-basekamp PT In-Gold di Mabilabol.
- Sehari sebelum pengambilan senjata (tanggal 7 November 2001) jam 6 sore/18.00 wit, Sdr. Anton berdiskusi dengan Sdr. Engel Kalapmabin dan Sdr. Engel Kasipmabin (*keduanya yang menemani Kopassus ke Kp. Yumakot untuk mengambil senjata*) di rumah Bp. Yosep Karyamabin/ Pegawai Kantor Perikanan, Kec. Oksibil.
- Sdr. Anton sebenarnya merupakan anak buah dari Sdr. Karel Uropkulin, pimpinan OPM yang masih berada di hutan. Selama di hutan Sdr. Anton mengalami peristiwa yang pahit, ialah sang istri dirampas oleh anggota Karel lainnya; akhirnya sikapnya yang berubah dan menyerahkan diri, dilanjutkan dengan suatu hubungan yang erat dengan Kopassus.
- Awal kehadiran Kopassus pada minggu ketiga Februari 2001, ada isu pemeriksaan anggota Kongres Papua, Satgas Papua, atribut Papua, dll. Suasana masih berjalan aman.

Sekitar soal kunjungan kerja Bupati serta peristiwa lanjut

Tanggal 18 Desember 2001, pertemuan dengan Bupati Jayawijaya di Mabilabol. Sdr. Anton berada di Mabilabol tapi tidak mengikuti pertemuan ini. Pertemuan antara Bupati Hubi, Muspica plus, instansi sipil maupun militer serta anggota masyarakat lainnya di Oksibil. Hadir juga Pater Dekan P. Wilem Sinawil, Pr.

- Sebagai pengurus LMA Ngalum, Bp. Yohanis secara lisan menyampaikan lima poin yang merupakan aspirasi masyarakat Ngalum kepada Bupati. Bentuk tertulisnya disampaikan melalui anggota DPRD Tk. II Jayawijaya perwakilan daerah Pegunungan Bintang.
- 18 Desember 2001 sore setelah Bupati pergi, dua anggota Kopassus masing-masing Let. Dua Lilik Indarto (Komandan Pos Kopassus Oksibil) dan Agung datang ke rumah Bp. Yohanis namun tidak sempat bertemu. Setelah kembali ke rumah sang Istri menyampaikan informasi ini sehingga Sdr. Yan Kasipmabin diminta ke Pos Kopassus untuk menanyakan tujuan kedatangan Kopassus ke rumah. Letda Lilik menjawab bahwa mereka ingin menanyakan laporan Bp. Yohanis kepada Bupati.
- Kira-kira jam 19.00 wit (jam 7 malam) Letda Lilik dan Agung datang kembali dan bertemu Bp. Yohanis di rumahnya, meminta 'pertanggungjawaban' atas pernyataan sikap yang disampaikan kepada Bupati. Dijawab bahwa pertanggungjawaban bisa dilakukan, asalkan melalui dialog di lapangan terbuka dan dihadiri oleh kepala-kepala desa yang saat itu menjadi saksi

disampaikannya pernyataan tersebut. Selanjutnya Serda Lilik mengubah permintaan dengan mengatakan 'meminta keterangan'.

- Penjelasan oleh Bp. Yohanis : masyarakat menyambut baik keputusan Mendagri tentang pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang dan tidak menginginkan suasana kekacauan yang dulu terulang lagi; atas nama Dewan Pengurus Masyarakat Adat (DPMA) Ngalum menolak sensus penduduk yang dilakukan Sdr. Anton karena tidak sah dan memuat nama anggota masyarakat yang tidak bersangkutan dengan OPM; berkaitan dengan pengambilan senjata, merupakan kenyataan karena dilaporkan oleh anggota masyarakat. Maka DPMA Ngalum tidak bertanggung jawab jika terjadi kekacauan mengingat dulu sudah mengundang pihak-pihak tersebut untuk melepas alat-alat kekerasan. Masyarakat Ngalum sudah lama menderita karena ulah TNI dan OPM; pernyataan tentang suasana keamanan di Oksibil kepada Bupati tidak menyebut nama anggota dan kesatuan TNI, melainkan Sdr. Anton yang disalahkan karena melakukan sensus gelap.
- Danpos Kopassus meminta Bp. Yohanis agar pada 20 Desember 2001 menunggu di kantor Dinas Pendidikan untuk bersama-sama mengoreksi nama-nama yang bukan anggota GPK OPM dalam daftar nama yang disusun Sdr. Anton. Bp. Yohanis menunggu, sedang Danpos Kopassus tidak datang.
- 21 Desember 2001 Sdr. Anton memberitahukan kepada Bp. Yohanis untuk keluar dari Mabilabol/bersembunyi karena ada rencana akan dihilangkan oleh Kopassus. Pernyataan ini diperkuat oleh seorang anggota Koramil asal Ngalum. Selain Yohanis, disebut sejumlah nama lainnya yang juga menjadi target Kopassus : Tonny Oktemka, Engel Uropmabin, Yosep Sasaka, Kristian Sasaka, Kristoforus Uropdana, Felix Uropdana.
- Informasi yang sama disampaikan yang oleh anggota Koramil asal Ngalum ditambah teriakan dari sanak keluarga agar cepat meninggalkan rumah, membuat dirinya mengambil keputusan untuk keluar pada malam hari dan menginap di rumah keluarga dekat.
- 21 Desember 2001, Bp. Yohanis pergi ke Desa Yapimakot dan menyampaikan kepada Sdr. Yosep Sasaka dan Kristoforus Uropdana tentang ancaman yang sama terhadap mereka dan peristiwa yang dialaminya.
- 22 Desember Sdr. Anton meninggalkan Mabilabol ke Jayapura dan mengirim dua orang anggotanya yang saat ini sedang aktif di Oksibil (Kostan Tapior dan Kasipmabin, *nama tidak diketahui secara jelas*).
- 26 Desember 2001, Sdr. Yosep, Kris dan Yohanis sendiri menyampaikan permasalahan ini kepada Bapak Uskup yang memimpin perayaan Natal di Yapimakot.
- 14 Januari 2002 Bp. Yohanis baru kembali ke rumah setelah mendengar informasi adanya kunjungan dari SKP.

3.b. Pendapat serta perasaan pihak keamanan

1. Pertemuan dengan Pos Kopassus Oksibil (15 Januari 2002)

Dari pertemuan dengan pihak Kopassus dapat dicatat:

Sekitar kehadiran Sdr. Anton

- Pihaknya (Danpos, Letda Lilik Indarto) sudah melaporkan kehadiran Sdr. Anton kepada LMA Ngalum dalam hal ini kepada Bp. Yohanis. Namun pemberitahuan dilakukan setelah Sdr. Anton sudah seminggu berada di Oksibil dan melakukan sensus (tiba pertengahan Oktober 2001).
- Tanggal 22 Desember sudah berangkat dari Oksibil kembali ke Jayapura.
- Menurut Letda Lilik, keberadaan Anton termasuk rencana perjalanannya ke Oksibil, sepenuhnya diatur oleh Komandan Kopassus di Jayapura. SKP disarankan agar menanyakan hal ini secara langsung kepada komandan di Jayapura nantinya. Yang jelas, Pos Oksibil hanya melaksanakan perintah atasan termasuk misalnya membantu Anton jika dikirim kembali ke Oksibil.

Sekitar pengadaan 'sensus'

- Sensus penduduk yang dilakukan Sdr. Anton bertujuan, mendata masyarakat yang merupakan mantan GPK OPM untuk dimukimkan kembali melalui program rumah sehat. Mereka merupakan mantan anggota Paulus Kaladana dan tergolong masyarakat pra-sejahtera.
- Data yang terkumpul akan diajukan kepada Pemda (*tidak jelas, Pemda Kabupaten atau Propinsi yang dimaksud; SKP*).
- Program yang sama sudah dilakukan di Batom pada tahun 1999/2000.
- Sensus semata-mata merupakan program kemanusiaan karena Kopassus tidak tega melihat 3-4 keluarga mendiami satu honai yang penuh sesak sehingga dipandang tidak manusiawi.
- Telah sepakat dengan LMA (melalui Bp. Yohanis) untuk memeriksa kembali data tersebut dan mencoret nama-nama yang bukan menjadi anggota OPM, namun belum dilakukan hingga saat ini.

Catatan-catatan ini dipertanyakan oleh SKP, sbb.

- Jika dikatakan sensus merupakan program kemanusiaan, mengapa Kopassus maupun Sdr. Anton terlibat dalam program ini ?
- Program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya menjadi tugas utama dari pemerintah !
- Dan jika disebut sebagai program kemanusiaan pula, mengapa tidak dilakukan terhadap semua anggota masyarakat yang kenyataannya membutuhkan hal yang sama – mengapa hanya ditujukan kepada anggota OPM ?
- Masyarakat yang dikatakan pengikut OPM sehingga dicap GPK, terdiri dari : kelompok yang benar-benar mendukung OPM dan memilih tinggal di hutan;

dan kelompok yang berstatus simpatisan hanya karena adanya hubungan keluarga dengan pimpinan OPM atau karena dipaksa untuk terlibat. Jenis mana yang dicari ? Mengingat dalam daftar dimaksud terdapat nama-nama yang sebenarnya hanyalah masyarakat biasa yang saat ini bertempat tinggal di kampung.

- Fakta di masyarakat, sensus benar-benar tidak dipercaya masyarakat.
- Sensus dinilai sebagai upaya menghancurkan masyarakat, sebagai awal untuk mengulang kembali pengalaman pahit dimasa lalu.

Pertanyaan-pertanyaan ini ditanggapi oleh Kopassus, sbb.:

- kami 'hanya menjalankan perintah dari atasan' di Jayapura. Selain itu, sensus hanya ditujukan kepada mantan anggota TPN/OPM dengan tujuan, untuk membantu program pembinaan terhadap mereka agar sadar dan kembali menjadi warga yang baik.

Sekitar pengambilan senjata di Yumakot

SKP memperjelaskan bahwa pengambilan senjata di Yumakot, tidak diterima oleh masyarakat karena adanya perbedaan antara tujuan awal dari kedatangan Kopassus ke kampung tersebut yakni dalam rangka melaksanakan pengobatan kesehatan. Namun yang terlihat di lapangan adalah pengambilan senjata.

- Hal ini dijawab oleh Letda Lilik dan anggotanya sebagai rahasia kerja lembaga. Yang berhak menjawab adalah komandan Kopassus di Jayapura.

Sekitar soal ancaman terhadap sejumlah tokoh masyarakat

SKP memperjelaskan bahwa sekurang-kurangnya enam warga diancam yakni Bp. Yohanis dan kelima rekannya (nama disebutkan), hingga terpaksa lari dan bersembunyi diri di hutan sejak 21 Desember 2001. Baru kembali ke rumah/ Mabilabol pada 14 Januari 2002 setelah mendengar tentang kedatangan tim SKP. Pilihan untuk bersembunyi dengan meninggalkan anak-istri semakin menambah ketakutan pada warga lainnya. Apa benar Kopassus melakukan ancaman tersebut setelah pertemuan bersama Bupati pada 18 Desember 2001 ?

- Tanggapan Kopassus : tidak ada ancaman kepada 6 orang warga tersebut. Letda Lilik mengakui bahwa setelah pertemuan dengan Bupati dirinya memang menemui Bp. Yohanis pada sore hari guna menanyakan maksud dari pernyataannya kepada Bupati seputar kondisi keamanan di Oksibil. Ia mengaku mengerti setelah dijelaskan oleh Bp. Yohanis.
- Setelah pertemuan sore, diakui Kopassus tidak lagi datang ke rumah Bp. Yohanis, termasuk pada hari-hari selanjutnya.
- Kopassus dewasa ini ingin memperbaiki citranya yang sudah terlanjur jelek di mata masyarakat Papua akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Kopassus di masa lalu. Karena itu, mereka ingin menjaga relasi yang baik dengan masyarakat setempat dimana mereka bertugas.
- Menjadi jelas bahwa ancaman tersebut hanya disebarkan oleh Sdr. Anton. Bertujuan membuat warga takut sehingga tidak mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama di Oksibil.

2. Pertemuan dengan anggota Koramil (15 Januari 2002)

Setelah bertemu dengan Kopassus, SKP sempat bertemu dengan personel kantor Koramil Mabilabol yang hanya dihuni oleh 2 orang anggota. Danramil sedang berada di Wamena. Pertemuan berlangsung singkat mengingat kedua anggota baru bertugas di Oksibil sejak 29 Desember 2001. Sehingga tidak mengetahui permasalahan dengan baik.

3. Pertemuan dengan Pos Yonif 725 (15 Januari 2002)

Pertemuan dilakukan dengan Komandan Pos Yonif 725 Bp. Sudirman, S.S di Pos Yonif. Yonif 725 merupakan pos pasukan yang diperbantukan pada Kodim 1702 Wamena. Berasal dari Weriagi, Sulawesi Tenggara, dengan jumlah pasukan yang bertugas di Oksibil sebanyak 17 orang. Sudah bertugas selama 7 bulan dari total 10 bulan yang direncanakan.

Setelah SKP memperjelaskan keresahan yang sedang menimpa masyarakat Oksibil Komandan Pos Yonif 725 memperjelaskan sbb.:

- Selama ini suasana aman, hubungan dengan masyarakat terjalin baik.
- Menjadi berubah dan meresahkan masyarakat setelah kedatangan Sdr. Anton Kasipmabin yang melakukan pendataan warga di Oksibil.
- Kedatangan Anton tidak dilaporkan kepada Pos Yonif 725 maupun Danramil Oksibil sebagai penguasa keamanan setempat.
- Tugas-tugas yang dijalankan Anton tidak jelas bagi masyarakat (menurut informasi yang disampaikan masyarakat ke Pos Yonif 725).
- Tentang pendataan, Dan Pos Yonif tidak mengetahui maksud dari pendataan yang dilakukan Anton.
- Tujuan kehadiran Anton di Oksibil sempat ditanyakan kepada Dan Pos Kopassus maupun kepada Anton sendiri namun tidak ada penjelasan.
- Berpendapat jika Anton tidak perlu ada di Oksibil lagi karena dinilai hanya memperuncing keadaan.
- Keresahan masyarakat akibat kehadiran Anton sudah disampaikan kepada Komandan Kompi Yonif 725 di Kiwirok.
- Tentang pengambilan senjata di Yumakot, hanya mengetahui dari Danramil.
- Pos Yonif tidak terlibat dalam kegiatan perbaikan lapangan terbang Mabilabol. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bertugas: membuat kebun percontohan, memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di 6 desa, yang menurut komandan dinilai positif oleh masyarakat.
- Selama bertugas pasukan tidak melakukan patroli karena suasana dinilai aman.
- Pos Yonif tidak tahu mengenai segala macam ancaman yang sedang membuat masyarakat resah dan mengakibatkan bahwa sejumlah tokoh masyarakat sedang dalam persembunyian. Baru sekarang tahu melalui laporan SKP.

3.c. Beberapa kesimpulan

- Bagi segala pihak menjadi cukup jelas bahwa kehadiran Sdr. Anton mengganggu ketenangan masyarakat, sampai mengingatkan masyarakat akan "suasana serba takut" di masa yang lampau.
- Jelas juga bahwa pengambilan senjata oleh pihak Kopassus secara tersembunyi meresahkan masyarakat.
- Walau Kopassus mengakui bahwa ingin memulihkan kembali hubungan baik dengan masyarakat, tidak termasuk didalamnya untuk memperjelaskan programnya secara transparan; ternyata ada rencana/program 'rahasia'.
- Kopassus setempat hanya 'ikut sistem komando dari atas' hingga sulit untuk mendapat informasi yang jelas.
- Hubungan koordinasi antar unit-unit keamanan ternyata tidak ada.
- Jelas bahwa peranan pemerintah sipil di wilayah Oksibil tidak ada.
- Jelas bahwa Lembaga Adat Ngalum menuntut peranannya, termasuk perannya dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan setempat, sebagai wakil sah masyarakatnya.

4. PERTEMUAN GABUNGAN: MASYARAKAT dan PIHAK KEAMANAN

(16 Januari 2002)

Setelah memperoleh suatu gambaran mengenai kedudukan persoalan serta peran masing-masing pihak, SKP menyelenggarakan suatu pertemuan gabungan antara masyarakat dan pihak keamanan. Tujuan pertemuan ini adalah sbb.:

- [1] supaya perasaan dari pihak masing-masing diungkapkan di depan umum, dan
- [2] supaya dicari jalan serta komitmen masing-masing pihak guna memperbaiki suasana kemasyarakatan.

Pertemuan diadakan di Balai Desa Mabilabol. Selain SKP dan para pastor, pertemuan dihadiri oleh 6 orang warga yang diancam, tokoh-tokoh adat, kepala-kepala desa di sekitar Mabilabol, kelima anggota Kopassus, komandan pos Yonif 725, anggota Koramil, dan anggota Polsek Mabilabol. Tidak ada perwakilan dari unsur pemerintahan sipil termasuk camat yang sudah lama meninggalkan tugas dan tinggal di Wamena.

o Mendengar pendapat/perasaan

Bp. Tonny Oktemka (atas nama KPMO)

- Memaparkan sejarah perjalanan hidup masyarakat Ngalum. Orang Ngalum hidup diatas tanah airnya sendiri secara damai selama ratusan tahun. Muncul kebingungan setelah adanya kontak dari pihak luar. Kontak pertama berupa masuknya gereja Katolik di tahun 1958. Tahun 1958, pemerintahan Belanda membuka pos di Oksibil yang merupakan pos pemerintahan pertama di daerah Ngalum. Pos pemerintahan Oksibil berubah nama dari Distrik ke KPS, kemudian menjadi Kecamatan hingga saat ini. Tahun 1961, Indonesia memasuki daerah Ngalum, membuat masyarakat tambah terkejut dan bingung.

Tahun 1977, muncul OPM di Tabolding yang dipimpin oleh Karel Uropkulin. Kekerasan terjadi, masyarakatlah yang menjadi korban. Tahun 1977 hingga tahun 1998, masyarakat diperlakukan sewenang-wenang : ditangkap, disiksa, hingga dibunuh. Masyarakat menjadi korban atas perlakuan TNI maupun oleh OPM. Tahun 1998-1999, masyarakat berani membicarakan masalah-masalah yang dialami yang kemudian diangkat oleh SKP dan dilaporkan kepada semua pihak terkait. Sehingga dari tahun 1999-2000, suasana menjadi aman, masyarakat mulai hidup normal. Namun keresahan mulai muncul tahun 2001 dengan hadirnya Anton Kasipmabin.

Mengenai Anton, tahun 1984 bergabung dengan kegiatan OPM yang dipimpin

Paulus Kaladana yang menamakan dirinya sebagai OPM Wilayah Bintang Sipik, berpusat di Yapsi, Batom.

Kehadirannya membuat masyarakat resah karena :

- a) Anton yang sebenarnya melawan TNI selama 27 tahun sebagai OPM di hutan, namun bisa ke Oksibil dari Jayapura dan berhubungan erat dengan Pos Kopassus !
- b) Kedatangannya tidak dilaporkan kepada masyarakat melalui LMA Ngalum yang ada.
- c) Membuat sensus penduduk dengan mencantumkan nama-nama warga yang sebenarnya bukan anggota OPM.
- d) Menyampaikan kepada masyarakat bahwa 6 orang warga diancam Kopassus akan dibunuh.

Atas semua hal tersebut, atas nama KPMO dan masyarakat Ngalum mengambil sikap sebagai berikut :

- Menolak Kopassus Pos Batom dan kantor pusat Kopassus di Jayapura untuk mengrim Anton c.s juga Paulus c.s ke Oksibil.
- Semua kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh siapa saja harus dikoordinasikan dengan masyarakat Ngalum.
- Meminta Sdr. Anton Kasipmabin c.s maupun Paulus Kaladana c.s mempertanggungjawabkan semua nyawa manusia dan harta benda milik masyarakat yang menjadi korban akibat tindakan mereka selama 27 tahun di hutan sebagai TPN/OPM.

Ungkapan pendapat sebagaimana disuarakan oleh Tonny Oktemka masih dilengkapi oleh dua tokoh masyarakat lainnya, yakni: Bp. Yohanis Kakyarmabin (sebagai korban), dan Bp. Esau Uropmabin (Kepala suku besar, dan Ketua LMA Ngalum).

Bp. Yohanes:

- Menceriterakan kembali 5 poin aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan Bupati Jayawijaya.
- Mengungkapkan kronologis ancaman dan persembunyian (sda)
- Mempertanyakan keberpihakan Kopassus pada Anton bahwa siapa sebenarnya yang merugikan negara - Anton atau dirinya yang nota bene sudah mengabdikan sebagai pegawai negeri RI selama 30-an tahun.
- Dirinya maupun masyarakat Ngalum ingin hidup damai.

Bp. Esau:

- Pada awalnya tidak terlalu keberatan terhadap kedatangan Anton, namun karena tujuan kedatangannya tidak jelas dan isinya tidak diberitahukan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, maka timbul keberatannya dan ketidaksetujuan atas kehadiran Anton.

Setelah mendengar pendapat dari beberapa tokoh masyarakat terdapat giliran buat pihak keamanan untuk mengungkapkan pendapat serta perasaannya. Hasilnya sbb.:

Sudirman, S.S – Komandan Pos Yonif 725

- Sependapat dengan pernyataan Bp. Tonny Oktemka bahwa sebelum Sdr. Anton ke Oksibil, masyarakat hidup dengan tenang. Namun suasana berubah resah setelah kedatangannya yang juga membuat aktifitas masyarakat menjadi terhambat.
- Tujuan kedatangan Anton seharusnya diberitahukan kepada Danramil ataupun dirinya selaku komandan pos Yonif.
- Tentang nasib 6 warga yang terpaksa bersembunyi karena merasa diancam, dirinya baru mengetahui dari Br. Theo dalam pertemuan dengan tim SKP.
- Saran : mendukung sikap masyarakat yang menolak kembalinya Sdr. Anton ke Oksibil dengan alasan dan pengalaman keamanan yang sudah disebutkan diatas.

Letda Lilik Indarto – Komandan Pos Kopassus

- Kedatangan Anton atas perintah dari Paulus Kaladana melalui komandan Kopassus di Jayapura. Sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah dari atasan di Jayapura untuk mengamankan Anton selama berada di Oksibil.
- Meminta maaf kepada masyarakat karena sebelumnya tidak mengadakan koordinasi mengenai tujuan kedatangan Anton.
- Dirinya telah melaporkan suasana masyarakat yang resah akibat kehadiran Anton kepada komandan di Jayapura sehingga Anton sudah ditarik pulang.
- Masyarakat bisa menantikan hasil pertemuan selanjutnya antara SKP dan komandan Kopassus di Jayapura.
- Kopassus pos Oksibil tetap konsekuen dengan hasil pertemuan di aula Mabilabol pada awal kedatangan Kopassus bahwa, tujuan kehadiran Kopassus di Oksibil adalah untuk memperbaiki citra lembaga yang dulunya sangat jelek di mata masyarakat.
- "Pos Kopassus sudah berupaya maksimal menjaga nama baik, namun Tuhan lah yang menentukan segala-galanya".
- Mengenai ancaman penculikan terhadap 6 tokoh masyarakat, Kopassus sama sekali tidak mempunyai niat demikian.
- Terhadap kasus tersebut diatas, akan ditindaklanjuti karena Anton telah mencemarkan nama baik Kopassus.
- Kopassus ingin kembali menjaga relasi dengan masyarakat seperti sebelum kedatangan Anton.
- Mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini.

Supriadi – anggota Kopassus

- Kopassus tidak akan melakukan keresahan seperti yang belakangan ini dirasakan oleh masyarakat, mengingat slogan TNI adalah dari – oleh – untuk masyarakat.
- Merupakan sangkaan orang-orang tertentu yang menginginkan Kopassus Tribuana Papua memiliki citra buruk di masyarakat.
- Mengharapkan agar tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan ini menyampaikan kepada masyarakat luas jika isu-isu yang berkembang tidak

benar.

- Dibutuhkan keterbukaan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada.

Agung – anggota Kopassus

- "Sebagai pribadi saya merasa sangat tersentuh oleh apa yang diungkapkan oleh Bp. Yohanis" dan mohon maaf kepada masyarakat dan khususnya kepada 6 tokoh atas nasib buruk yang dialami sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Bp. Yohanis dan Bp. Tonny.
- Tidak ada maksud menculik bahkan membunuh ke-6 bapak yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri. Meminta maaf atas isu tersebut.
- Dirinya berjanji untuk menyampaikan situasi ini kepada komandan Kopassus saat tiba di Jayapura pada hari Jumat, 18 Januari 2002.
- Kedatangan Kopassus adalah dalam rangka memajukan masyarakat Oksibil supaya sama dengan masyarakat di daerah lain.
- Menawarkan diri untuk 'mengambil tindakan' terhadap Anton bila diminta oleh masyarakat.

Anis – Anggota Kopassus

Mengemukakan isu-isu yang berkembang luas sehubungan dengan beberapa kegiatan yang melibatkan Kopassus (pengaspalan lapangan, kasus Didimus yang dicap pembunuh karena memiliki 'ilmu hitam', dll). Mengajukan agar jika ada isu demikian perlu dikonfirmasi sebelum berkembang luas dan meresahkan masyarakat.

Ungkapan pendapat serta perasaan sebagaimana dicatat di atas ini ditanggapi oleh sejumlah anggota masyarakat, sbb.:

- **Bp. Kristoforus Uropdana**
Menyampaikan kelegannya atas pernyataan dari Komandan Kopassus jika tidak ada rencana penculikan seperti yang disampaikan kepada 6 tokoh masyarakat.
- **Bp. Engelbertus Uropmabin (Ka. Puskesmas Mabilabol)**
Masyarakat hanya mendengar bahwa Anton telah menyerah dan keluar dari kegiatan OPM. Namun langsung ke Jayapura lalu ke Oksibil, maka tetap dianggap OPM. Sebab pernyataan menyerahnya tidak dilakukan di depan masyarakat. Karena itu tetap menolak kehadiran Anton di Oksibil.
- **Bp. Anton Uropdana (Ka. Desa Kutdol)**
Menyarankan agar Anton tidak kembali ke Oksibil karena kehadirannya lalu terbukti meresahkan masyarakat.
- **Bp. Hironimus (anggota masyarakat)**
 - Mengharapkan agar tahun ini bukan merupakan tahun bermasalah bagi masyarakat Oksibil melainkan tahun pembangunan. Masyarakat sedang menyiapkan diri menyambut program kabupaten yang mau diadakan bagi Pegunungan Bintang;
 - Aparat perlu menunjukkan diri sebagai 'guru' sebagaimana yang diharapkan masyarakat selama ini;

- Selain Anton Kasipmabin dan Paulus Kaladana, anggota-anggotanya pun jangan 'menginjakkan kakinya di Oksibil';
- Jika aparat ingin mendidik mereka, lakukan saja di Jayapura karena ada sekolah militer di Jayapura.

o **Pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat**

Isi pendapat masyarakat dituangkan dalam suatu pernyataan sikap yang resmi, yang tertanggal 16 Januari 2002 dan yang ditandatangani oleh Amoksarem Esau Uropmabin (selaku Ketua LMA Wil. Pegunungan Bintang), Yohanes W. Kakyarmabin (selaku korban) dan Anthony D. Oktemka (selaku Angg. Kelompok Peduli Masyarakat Oksibil). Sikap dirangkumkan dalam tiga butir, yang kami kutip sehurufnya sbb.:

- Paulus Kaladana pimpinan TPN/OPM wilayah Bintang Sipik dan komandan Pos Tribuana kecamatan Batom di Batom serta pimpinan tertinggi Tribuana di Jayapura tidak dibenarkan untuk mengirim/membantu mengirim Anton Kasipmabin ke Oksibil bersama anak buah lainnya lagi.
- Paulus Kaladana cs. Dan Anton Kasipmabin pertanggungjawabkan harta benda, nyawa manusia, atau masyarakat yang korban karena tindakannya selama 18 tahun di hutan sebagai anggota TPN/OPM.
- Kami masyarakat menyatakan dengan tegas atas semua program, langkah, kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pihak siapa saja (pemerintah, gereja, LSM) di Pegunungan Bintang umumnya dan khususnya kecamatan Oksibil harus ada koordinasi yang jelas dengan semua pihak (Pemerintah, Gereja, LSM, LMA, Perempuan).

Segala pihak yang menghadiri pertemuan gabungan ini ternyata memahami dengan baik isi pernyataan sikap ini dan menyatakan dukungannya.

o **Kesimpulan serta komitmen bersama**

Setelah mendengar segala perundingan selama pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih, SKP menawarkan suatu kesimpulan pertemuan ini dan merumuskan sejumlah unsur komitmen bersama, sbb.:

Empat unsur utama yang dirasakan dan terungkap dalam pertemuan ini :

1. Latar belakang timbulnya keresahan karena kehadiran Sdr. Anton Kasipmabin di Oksibil.
Kehadiran Anton diartikan sebagai kehadiran OPM yang sudah lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat akibat tindakan yang diambil aparat/TNI.

Hal ini perlu diangkat untuk menjadi pengetahuan bersama, terutama bagi aparat keamanan yang baru bertugas di Oksibil.

2. Kehadiran OPM, sebenarnya ditolak masyarakat.
Alasan, ingatan akan penderitaan yang dialami begitu lama akibat penyerangan yang dilakukan oleh OPM dan tindakan balasan oleh TNI. Anton maupun Paulus dan kawan-kawannya adalah sumber masalah yang utama dimana secara adat, mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang sudah diderita masyarakat, baik nyawa maupun harta benda. Pertanggungjawaban menjadi syarat bagi mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat.
3. Ancaman penculikan terhadap 6 orang anggota masyarakat oleh Anton sungguh berdampak besar. Membuat mereka takut dan tidak bergerak selama hampir satu bulan. Kesan yang diterima masyarakat bahwa, ancaman oleh Anton sama dengan ancaman Kopassus yang pada kenyataannya ternyata tidak berdasar menurut keterangan dari pihak Kopassus.
4. Forum ini menjadi media untuk secara bersama-sama mengungkapkan kejujuran sehingga pembicaraan hari ini sama dengan komitmen bersama untuk hidup selanjutnya tanpa keresahan. Juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu-isu yang sangat melumpuhkan gerak-gerik masyarakat.

Komitmen pada pelbagai tingkat:

- Di tingkat masyarakat :
 - a) Anton, Paulus dan kawan-kawan tidak boleh injak Oksibil lagi.
 - b) Alasan, banyak penderitaan yang ditimbulkan dimasa lalu masih tersimpan dengan jelas dalam ingatan warga.
 - c) Apalagi datang dengan tugas yang tidak jelas.
- Di tingkat aparat :
 - a) Menyetujui sikap masyarakat untuk tidak mendatangi Anton maupun Paulus, dkk.
 - b) Mengerti keresahan yang timbul akibat kehadiran Anton.
 - c) Mengakui jika hanya melaksanakan perintah atasan.
- Di tingkat SKP :
 - a) Akan menyampaikan sikap masyarakat kepada komandan Kopassus di Jayapura;
 - b) Berniat membantu masyarakat agar tercipta suasana hidup tanpa ketakutan;
 - c) Tidak berniat untuk melestarikan masalah, namun siap membantu untuk mencapai suatu jalan keluar.
 - d) Segala laporan SKP akan bersifat pelaporan terbuka dan obyektif.

5. TINDAK LANJUT

Sekembali di Jayapura SKP mengadakan pertemuan dengan dua pihak yang langsung berkepentingan, ialah: [1] pertemuan dengan Pimpinan Kopassus Tribuana di markasnya di Jayapura, dan [2] pertemuan dengan Bp. Anton Kasipmabin, mantan pemimpin OPM yang sedang 'berkemah' di Sentani.

a. Pertemuan dengan Kepala Kopassus di Jayapura

Pertemuan dengan Komandan Kopassus Tribuana X, Letkol Hartomo, diadakan di Markas Kopassus, Hanurata-Hamadi, pada tanggal 25 Januari 2002. Selama pertemuan berjalan SKP meminta keterangan atas sejumlah unsur permasalahan sebagaimana ditemukan di wilayah kecamatan Oksibil. Hasil pertemuan dapat dirangkumkan dalam sejumlah butir⁵ sbb.:

- Letkol Hartomo memperjelaskan doktrin Kopassus. Pada dasarnya Kopassus berhubungan dengan siapa saja. Dalam doktrin mereka dikenal istilah KAWAN yang diartikan merupakan masyarakat luas dan LAWAN yang khusus di Papua ditujukan kepada OPM dengan alasan, melakukan kegiatan separatis – melawan NKRI. Namun dalam pendekatannya, oleh Kopassus anggota OPM kadang-kadang diterima sebagai KAWAN khususnya terhadap mereka yang sudah menyatakan 'menyerah' dan mau kembali ke pangkuan RI.
- Pendekatan berupa menjadikan mereka (mantan-OPM) sebagai KAWAN tidak bermaksud untuk menakut-nakuti rakyat. Sama halnya dengan personil Kopassus sendiri. Jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota di lapangan seperti memukul dan menyiksa masyarakat, mengambil ternak peliharaan, dan lain-lain, perlu dilaporkan kepada dirinya selaku atasan sehingga anggota yang bersangkutan akan diberi hukuman.
- Tentang Sdr. Anton, dia sendiri yang datang ke Kopassus dan kadang meminta bantuan yang akhirnya dilayani oleh Kopassus dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menyadari kesalahannya dan mau kembali menjadi warga negara yang baik. Pernah meminta bantuan keuangan untuk pulang kampung ke Oksibil dengan tujuan mau mengunjungi keluarga, maka Kopassus membantunya.
- Dengan tegas dikatakan bahwa, tidak ada perintah dari pihaknya (Komandan Kopassus) kepada Anton untuk pergi ke Oksibil dengan agenda-agenda seperti yang sudah dilakukan termasuk membuat sensus sehingga

⁵ Teks lengkap disediakan dalam Lampiran.

meresahkan masyarakat.

- Letkol Hartomo bersumpah demi Tuhan kalau tidak pernah memberikan perintah demikian baik kepada Anton maupun anak buah di lapangan. Menurutnya, kemungkinan Anton "menipu" anggotanya di Oksibil bahwa kedatangannya dan sensus penduduk merupakan perintah dari komandan Kopassus di Jayapura. Sehingga wajar saja kalau anggotanya nampak melindungi Anton selama berada di Oksibil. Ia mengaku kalau merasa nama baiknya dan nama lembaga dicemarkan Anton; kepercayaan yang diberikan kepada Anton karena kadang mengakui dirinya sebagai "orang besar" di seluruh Oksibil sudah disalahgunakan sehingga Anton akan ditindak sambil memberhentikan hubungan kerjasama dengan Anton.
- Mengenai pemanfaatan mantan-OPM, komandan Kopassus menilai bahwa wajar saja jika setiap penguasa biasanya memiliki "antek-anteknya" dari pihak lawan. Dirinya mencontohkan pemerintahan jajahan Belanda yang dulunya menjadikan beberapa warga Indonesia sebagai 'kaki tangannya' demi mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia.
- Letkol (inf) Hartomo mengakui bahwa Anton dan kawan-kawan semacamnya digunakan dalam rangka operasi intelijen yang bertujuan, menarik anggota OPM lainnya untuk turun gunung.
- Selain itu, operasi yang sama dilakukan untuk menarik anggota masyarakat yang saat ini tinggal di perbatasan RI-PNG agar mau kembali menetap di wilayah RI/Irja. Langkah mengembalikan penduduk Irja di perbatasan juga dimaksudkan untuk memutuskan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM.
- Unsur kegiatan yang dimaksudkan di atas diakuinya semata-mata sebagai *tugas kemanusiaan* yang dilakukan Kopassus dalam membantu Pemda dalam memukimkan kembali penduduk yang tinggal di perbatasan tersebut yang tidak memiliki tanah dan hidup tidak sejahtera. Karena upaya yang selama ini ditempuh oleh Pemda tidak membawa kemajuan dimana warga mengambil sikap tidak mau pindah dan menetap di wilayah RI/Irja.
- Berhubungan dengan pengambilan senjata di Yumakot, Letkol Hartomo menjawab bahwa aksi tersebut merupakan wujud kewajiban militer dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam menjaga keutuhan teritorial. Persoalan semacam ini tidak perlu di-*gede-gede*-kan. Dasarnya, undang-undang tidak memperbolehkan warga sipil menyimpan senjata. Dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan tugas mulia yang dijalankan Kopassus sehingga mengapa harus dipersalahkan. (*bukan pelayanan kesehatan yang dipersoalkan - SKP*).

- Pemakaian pelayanan kesehatan sebagai 'kedok' buat kegiatan lain, ditanggapi oleh Letkol Hartomo dengan menyatakan bahwa "kepura-puraan dalam hal ini adalah strategi agar tidak timbul ketakutan di masyarakat".
- Komandan Kopassus ini meminta maaf jika peristiwa tersebut meresahkan masyarakat dan berjanji agar di waktu yang akan datang kebijakan seperti ini akan disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya di tempat. Karena menurutnya kehadiran Kopassus adalah untuk membangun masyarakat, bukan untuk menyakiti.
- Letkol Hartomo menegaskan menerima permintaan masyarakat untuk tidak lagi mengirim Anton, Paulus dan kawan-kawan mereka ke Oksibil.

b. Pertemuan dengan mantan pemimpin OPM, Anton Kasipmabin

Pertemuan dengan Anton Kasipmabin, diadakan di Kantor SKP, Dok II, Jayapura, pada tanggal 28 Januari 2002. Pertemuan ini semula diprakarsai oleh pihak Kopassus, yang mengundang SKP untuk bertemu dengan Bp. Anton di Markas Kopassus. SKP menerima upaya pihak Kopassus dengan baik, namun hanya ingin mengadakan pertemuan dengan pribadi Bp. Anton saja dan bertempat di kantor SKP sendiri. Selama pertemuan berjalan SKP meminta keterangan atas sejumlah unsur permasalahan sebagaimana ditemukan di wilayah kecamatan Oksibil. Hasil pertemuan dapat dirangkumkan dalam sejumlah butir sbb.:

- Permasalahan yang menjadi alasan pertemuan ditanggapi oleh Bp. Anton dengan menyatakan: Dirinya merupakan putra daerah kelahiran Oksibil, umat Katolik pertama dari pusat paroki yang ada di Mabilabol hingga saat ini. Sejak 15 Januari 1981, meninggalkan Oksibil untuk berjuang bersama OPM di hutan selama 20 tahun. Menurutnya, sensus bukan ditujukan kepada penduduk yang sehari-harinya menetap di desa; melainkan ditujukan kepada warga Oksibil yang sudah lama meninggalkan kampung halaman dan menetap di daerah perbatasan RI-PNG. Program ini dimaksudkan untuk mengajak mereka pulang ke kampung halaman dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2010. Warga Oksibil yang didata adalah mereka yang telah kembali sekitar tahun 1996. Sensus bukan suruhan Kopassus, merupakan program yang dilakukan oleh putra asli Oksibil. Menganggap sensus lalu tidak perlu dipermasalahkan lagi.
- Berhubungan dengan undangan dari pihak LMA kepada Bp. Anton bersama Bp. Paulus Kaladana dan sesama pejuang OPM untuk bertemu dan membicarakan pelepasan senjata (undangan pada kesempatan acara sosialisasi hasil Kongres Papua II) ditanggapi oleh Bp. Anton dengan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak menerima surat undangan dimaksud. *Sebelum topik ini ditanyakan, Anton sendiri mengakui jika*

surat tersebut dikirim oleh Satgas Papua di Oksibil; yang oleh Br. Theo diluruskan bahwa bukan dari Satgas, melainkan dari LMA yang anggotanya sekaligus merupakan Panel yang menjadi peserta Kongres Papua 2000. Bp Anton mengakui kalau dirinya tidak mengetahui keberadaan LMA di Oksibil. Namun pada saat ke Oksibil untuk melakukan pendataan, sebanyak tiga kali ia telah mengajukan permintaan ingin berbicara dengan Tonny Oktemka maupun Yohanis Kakyarmabin namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh keduanya.

Catatan : permintaan pertemuan yang dikatakan Anton, tidak diungkapkan dalam keterangan yang diberikan oleh ke-6 tokoh masyarakat dalam kunjungan SKP ke Oksibil. Yang diungkapkan masyarakat hanyalah sikap Anton yang tidak mau berkoordinasi dengan LMA, tokoh masyarakat setempat – termasuk informasi dari Pastor Paroki yang pernah menanyakan hal yang sama kepadanya namun diakui bahwa 'lembaga adat adalah dirinya sendiri'.

- Mengenai hubungannya dengan Kopassus, dan siapa yang membiayai perjalanan –Jayapura-Oksibil (PP), jawaban awal Bp. Anton tidak begitu jelas. Ia mengungkapkan bahwa selama satu tahun belakangan dirinya bersama keluarga hidup sangat menderita. Tidak mempunyai tempat tinggal, anak-anak belum bisa dimasukkan ke dalam IWOL (rumah inisiasi untuk laki-laki Ngalum), dan lain-lain. Menunjukkan kalau tidak ada hubungan antara dirinya dan Kopassus. Secara tidak langsung terdapat dimana Bp. Anton menyatakan bahwa dirinya berhubungan dengan Kopassus karena Kopassus adalah aparat keamanan. Hubungan yang sama sedapat mungkin juga dijalin dengan aparat pemerintahan lainnya seperti camat, Koramil, Kapolda dan aparat lainnya. *SKP mengatakan relasi tersebut justru dimengerti oleh masyarakat sebagai jadi 'kaki-tangannya' Kopassus sehingga mereka jelas-jelas menolak kehadiran Anton di Oksibil. Dan juga seperti yang diberitahukan oleh Kopassus jika Anton menjadi 'kaki-tangan' mereka dalam berbagai program yang sedang mereka jalankan. Hal ini ditanggapi oleh Anton dengan memperlihatkan mimik tidak menerima pengakuan Kopassus sebagaimana dijelaskan oleh SKP. Sepintas lalu Bp. Anton mengakui hubungannya dengan Bp. Paulus Kaldana, dan membenarkan bahwa Bp. Paulus tidak ada hubungan dengan Kopassus lagi.*
- Mengenai pengambilan senjata oleh Kopassus di Yumakot, Bp. Anton memperjelaskan sbb.: kegiatan demikian merupakan tugas rahasia yang tidak perlu dibesar-besarkan. Senjata tersebut diilustrasikan sebagai langkah 'mengambil istri orang' sehingga masyarakat tidak perlu meributkannya karena bukan merupakan hak mereka. Termasuk SKP juga sempat diingatkan untuk tidak meributkan hal ini karena suatu saat akan dipertanyakan oleh pihak tertentu (*tidak diperjelaskan oleh pihak mana akan dipertanyakan; SKP*). Mengakui jika gereja yang bicara jauh lebih

bagus, sementara masyarakat dituduh membesar-besarkan soal. Hal ini juga yang membuat dirinya mengingatkan (mengancam) Yohanis setelah melaporkan suasana keamanan kepada Bupati dengan alasan :

- Sensus dan pengambilan senjata dianggap sebagai 'masalah dalam keluarga/orang Oksibil sendiri', mengapa disampaikan kepada orang lain termasuk kepada Bupati Hubi yang merupakan orang Dani;
 - Dirinya sendiri tidak mengikuti pertemuan, hanya mendengar hasil pertemuan dari saudaranya Yanuarius Kasipmabin (*disebutnya sebagai kepala suku Oksibil yang saat ini berada di Wamena*);
 - Menyalahkan Yohanis Kakyarmabin maupun putra Oksibil lainnya yang selama ini mengaku tokoh masyarakat Oksibil, menjadi pejabat dengan NIP (Nomor Induk Pegawai Negeri) dan pangkat yang diberikan Indonesia, serta "makan uang banyak" dari Indonesia – tapi apa yang mereka lakukan kepada orang Oksibil sendiri? Masyarakat tetap hidup sengsara sampai saat ini.
- Bp. Anton menyatakan pula keinginannya akan pergi lagi ke Oksibil dan menanyakan ke-4 anggota masyarakat (*disebut Tonny Oktemka, Yohanis Kakyarmabin, Yosep Sasaka, Esau Uropmabin*) yang menurutnya telah membuat pernyataan akan membunuh dirinya. (*SKP bertanya: dari mana Bp. Anton telah memperoleh informasi demikian? Pertanyaan itu tidak dijawab; untuk memberikan informasi yang tepat SKP menyerahkan pernyataan masyarakat yang sebenarnya –copy dari yang asli- kepada Bp. Anton untuk dipelajari hingga dipahami dengan tepat*).
 - SKP memperjelaskan sikap masyarakat yang pada dasarnya mau menerima kepulangan Anton ke Oksibil dengan syarat :
 - Tidak menjadi kaki-tangan Kopassus lagi,
 - Mau hidup sebagai warga biasa di Oksibil, dan
 - Membereskan, dalam hubungan terbuka dengan LMA Ngalum, hal-hal yang selama ini dirasakan menyakiti masyarakat akibat tindakan-tindakan di masa lalu sewaktu masih aktif menjadi OPM.
 - Bp. Anton sendiri mengakui mau meminta maaf kepada Tonny, Yohanis dan kawan-kawan atas segala perbuatannya selama ini yang mungkin dinilai meresahkan.

KATA PENUTUP SEKALIGUS KESIMPULAN

Kisah kejadian sebagaimana diuraikan diatas ini menimbulkan satu pertanyaan pokok saja dan pertanyaan itu makin hari makin menuntut suatu jawaban yang jelas. Pertanyaannya: Pemerintah dan Aparat Keamanan mau membawa masyarakatnya kemana? dan kenapa? Coba kami memperjelaskan pertanyaan itu.

Masyarakat wilayah Kecamatan Oksibil sudah jenuh dengan segala bentuk kekerasan, entah berasal dari pihak siapapun. Masyarakat hanya ingin hidup dengan tenang dan dalam damai. Ternyata keinginan ini kurang didukung, malahan dengan sengaja diganggu oleh tindakan-tindakan oleh aparat keamanan yang dalam hal ini juga memanfaatkan "ketergantungan anak binaannya" seperti mantan figur-figur OPM yang berasal dari wilayah Pegunungan Bintang.

Bagi seorang pengamat yang obyektif sama sekali tidak jelas kenapa pihak keamanan tidak dapat menerima dengan baik saja bahwa masyarakat hidup dalam ketenangan? Ketidakpenerimaan suasana damai itu terbukti melalui inisiatif-inisiatif oleh aparat keamanan dkk. yang hanya meresahkan masyarakat hingga merusak sekali lagi suasana hidup yang begitu diharapkan oleh masyarakat. Kenapa demikian? Ada niat apa dibelakang inisiatif itu? atau ada 'program rahasia' apa pada pihak aparat?

Setiap pembaca laporan masyarakat di atas ini tidak dapat luput dari pertanyaan inti tadi. Jawaban ada pada pihak aparat, namun bagi masyarakat tetap tinggal ditebak saja! Sampai kapan demikian....?

**KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA**

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-534993**

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

Jayapura, 25 Januari 2002

No. : 031/FK/02/3.4.8.

Hal : Memo pertemuan dengan
Komandan Kopassus Tribuana X
Ref.: Perkembangan di Oksibil

Berikut ini kami catat jalannya pertemuan antara SKP dan Komandan Kopassus di Jayapura yang merupakan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat sebagaimana kami catat dalam laporan hasil kunjungan SKP ke Oksibil beberapa waktu lalu.

Catatan: Isi laporan pertemuan di bawah ini telah disampaikan kepada Komandan Kopassus untuk diperbaiki atau dilengkapi dimana dianggap perlu. Ternyata diterima oleh Komandan Kopassus sebagai laporan pertemuan yang tepat isinya.

Pertemuan berlangsung pada hari Jumat, 25 Januari 2002, bertempat di Markas Kopassus, Hanurata-Hamadi, Jayapura. Dimulai pukul 10.00 wit dan berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Hadir dari SKP, Br. Theo van den Broek ofm dan Sdri. Frederika Korain SH; sedangkan dari pihak Kopassus adalah Komandan Kopassus Letkol (Inf) Hartomo didampingi oleh Kapten (Inf) Antonius Kartika (terbatas pada setengah jam pertama pertemuan ini berlangsung).

Dari pihak SKP, diajukan sejumlah pertanyaan sebagai wujud konfirmasi atas laporan masyarakat dan informasi yang didapatkan saat melakukan kunjungan ke Oksibil. Jalannya pertemuan secara lengkap kami laporkan dibawah ini.

Seperti biasanya, pada awal pertemuan Br. Theo memperkenalkan SKP dan tugas yang dijalankan SKP yakni, turut prihatin terhadap suasana sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang di Papua dan jika perlu mengangkat persoalan yang dirasa merugikan kepentingan masyarakat agar mendapatkan jalan keluar demi terciptanya suasana hidup yang damai. Kemudian dijelaskan mengenai maksud dari pertemuan ini yang mana dalam rangka menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh masyarakat di Oksibil mengenai suasana yang meresahkan mereka dewasa ini, yang setidaknya melibatkan Kopassus secara langsung maupun dalam bentuk kehadiran pihak ketiga yang mendapat dukungan dari aparat.

Diungkapkan bahwa sewaktu Bapak Uskup Jayapura merayakan Natal bersama umat di Oksibil pada bulan Desember lalu, kepadanya disodorkan laporan dari masyarakat menyangkut kesulitan dan keresahan yang terjadi akibat kehadiran Sdr. Anton Kasipmabin, mantan OPM dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya yang terlihat

mendapat dukungan dari Kopassus. Atas laporan tersebut, SKP telah melakukan kunjungan ke Oksibil dan dalam kunjungan ini SKP akhirnya bertemu dengan berbagai instansi terkait di Mabilabol yang kemungkinan sudah dilaporkan oleh Pos Kopassus di Oksibil atau juga oleh salah satu anggotanya, Sdr. Agung yang menurut rencana berangkat ke Jayapura pada Jumat, 18 Januari 2002.

Yang menjadi inti soal adalah kehadiran mantan anggota OPM dalam hal ini Sdr. Anton, kenyataannya menimbulkan kesulitan besar ditengah masyarakat. Mengingat masyarakat menyimpan trauma yang begitu dalam akibat penderitaan yang ditimbulkan oleh OPM maupun aparat keamanan pada masa yang lalu. Posisi mereka 'terjepit' antara aksi yang dilakukan OPM dan tindakan balasan oleh aparat keamanan. Sdr. Anton kembali ke daerah (Oksibil) dengan tujuan yang tidak jelas, termasuk juga melakukan kegiatan yang tidak jelas di mata masyarakat setempat. Misalnya :

- melakukan sensus terhadap penduduk yang bertempat tinggal di kecamatan Oksibil, dengan tujuan mendata warga yang menjadi mantan anggota dari Paulus Kaladana untuk mendapatkan program bantuan sosial.
- Selama berada di Oksibil, Anton memiliki relasi erat dengan Pos Kopassus.

Kondisi tersebut diatas membuat masyarakat merasa resah, takut jika suasana penderitaan yang dulu akan terulang kembali. Apalagi dalam data yang dikumpul Anton, terdapat nama-nama warga yang sama sekali tidak terlibat dalam gerakan yang dilakukan Paulus Kaladana. Mereka merupakan masyarakat biasa yang sehari-hari bertempat tinggal di kampung tersebut.

Menjadi pertanyaan, ada tujuan apa dibalik semua kejadian ini ?

Dijawab oleh Letkol Hartomo bahwa, Kopassus pada dasarnya berhubungan dengan siapa saja. Dalam doktrin mereka dikenal istilah KAWAN yang diartikan merupakan masyarakat luas dan LAWAN yang khusus di Papua ditujukan kepada OPM dengan alasan, melakukan kegiatan separatis – melawan NKRI. Namun dalam pendekatannya, oleh Kopassus OPM kadang-kadang diterima sebagai KAWAN khususnya terhadap mereka yang sudah menyatakan 'menyerah' dan mau kembali ke pangkuan RI. Dengan demikian, pendekatan berupa menjadikan mereka sebagai KAWAN tidak bermaksud untuk menakut-nakuti rakyat. Jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota di lapangan seperti memukul dan menyiksa masyarakat, mengambil ternak peliharaan, dan lain-lain, perlu dilaporkan kepada dirinya selaku atasan sehingga anggota yang bersangkutan akan diberi hukuman.

Tentang Sdr. Anton, dia sendiri yang datang ke Kopassus dan kadang meminta bantuan yang akhirnya dilayani oleh Kopassus dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menyadari kesalahannya dan mau kembali menjadi warga negara yang baik. Pernah meminta bantuan keuangan untuk pulang kampung ke Oksibil dengan tujuan mau mengunjungi keluarga, maka Kopassus membantunya. Dengan tegas dikatakan bahwa, tidak ada perintah dari pihaknya kepada Anton untuk pergi ke Oksibil dengan agenda-agenda seperti yang sudah dilakukan termasuk membuat sensus sehingga meresahkan masyarakat. Akan tetapi dengan informasi yang disampaikan SKP, berarti yang

bersangkutan dianggap sudah melakukan tindakan diluar tugas-tugas yang sebenarnya diemban. Dengan demikian keberadaan Anton tergantung dari penilaian masyarakat sendiri dan jika masyarakat menginginkan diambilnya suatu 'tindakan' terhadap Anton, maka Kopassus bersedia melakukannya.

Menurutnya, kelihatannya Anton *berpura-pura baik* setiap kali datang ke Kopassus; namun di lapangan justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang sudah terbina dengan baik. Anton adalah OPM yang mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sehingga mendapat perhatian khusus seperti dukungan dalam hal akomodasi dan logistik. Akan tetapi jika benar melakukan kekacauan, akan DITANGKAP. Kata ini ditegaskan berulang kali. Tambahnya, Kopassus merasa dirugikan dengan tindakan Anton tersebut.

Ditanyakan kembali alasan dijalinnya hubungan antara Anton dan Kopassus yang meresahkan masyarakat. Br. Theo menjelaskan sejarahnya bahwa :

- Anton dan Paulus Kaladana menyerah kepada aparat dalam hal ini Kopassus pada tahun 1999. *Hal ini ditanya kembali oleh komandan yang menunjukkan kalau dirinya tidak mengetahui proses penyerahan diri tersebut dengan alasan, baru bertugas setahun sehingga belum memiliki banyak informasi.*
- Setelah menyerah, Anton bisa bepergian baik dari Batom ke Jayapura, dari Jayapura-Oksibil maupun sebaliknya, menjadi pertanyaan banyak orang : dari mana ia mendapatkan uang untuk perjalanan panjang ini?! Kalau demikian ada pihak yang selama ini menjadi sponsor utama dari Anton, terutama dengan melihat kedekatannya dengan Kopassus.

Pertanyaan : Mengapa Kopassus 'memelihara' Anton ?

Pertanyaan ini dijawab oleh komandan secara sangat singkat sbb.:

Menurut komandan Kopassus, Anton-lah yang melakukan tindakan yang 'kurang ajar' di lapangan sehingga akan ditindak tegas. Setelah itu kepada SKP disodorkan pertanyaan, hal apa lagi yang diinginkan dalam kasus Anton ?

Dengan jelas SKP mengulangi permintaan dari masyarakat bahwa Anton maupun Paulus Kaladana dan anak buah ataupun kawan-kawan mereka, tidak diperkenankan kembali ke Oksibil lagi. Ini pernyataan sikap yang tidak dapat ditawar lagi ! Ditegaskan sebagai permintaan yang sangat jelas dan mendasar dari masyarakat yang tertera juga dalam pernyataan sikap yang akan diberikan kepada Kopassus¹. Permintaan ini juga sudah disampaikan dalam pertemuan terbuka pada hari terakhir dari kunjungan SKP ke Oksibil yang dihadiri oleh masyarakat dan semua instansi di Mabilabol termasuk anggota Kopassus.

Karena dirasa belum menjawab pertanyaan tentang alasan Kopassus *memelihara* Anton, maka hal yang sama diajukan kembali oleh Br. Theo dengan penjelasan jika SKP ingin

¹ Dokumen yang dimaksud diserahkan oleh SKP kepada Komandan Kopassus pada akhir pertemuan.

memahami dengan baik hubungan yang sebenarnya dan tujuan dibalik kebijakan Kopassus dalam kedekatannya dengan mantan OPM seperti Anton maupun hal yang sama yang dilakukan terhadap Paulus Kaladana, Agus Kapropka di Iwur, juga alm. Willem Onde di Merauke.

Hal ini dijawab oleh Komandan bahwa wajar saja jika setiap penguasa biasanya memiliki "antek-anteknya" dari pihak lawan. Dirinya mencontohkan pemerintahan jajahan Belanda yang dulunya menjadikan beberapa warga Indonesia sebagai 'kaki tangannya' demi mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. *(Hal ini ditanggapi oleh Br. Theo bahwa tidak setuju dengan kebijakan masa lampau yang dijalankan 'keturunannya' tersebut).*

Mengulangi kembali jawaban yang sama bahwa apa yang dilakukan terhadap Anton adalah dalam rangka alasan kemanusiaan dimana Anton meminta bantuan uang untuk pulang kampung dan Kopassus memberi bantuan tersebut. Jika di kampung Anton melakukan aksi lain, berarti Anton yang 'nakal' ; karena itu akan ditindak. Ia juga menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan bersama Anton, Kopassus dan SKP yang dijawab oleh Br. Theo jika SKP mau menemui Anton secara pribadi tanpa kehadiran aparat.

Pada saat pertanyaan yang sama diulang kembali, komandan Kopassus akhirnya menjawab juga bahwa Anton dan kawan-kawan semacamnya digunakan dalam rangka operasi intelijen yang bertujuan, menarik anggota OPM lainnya untuk turun gunung. Selain itu, operasi yang sama dilakukan untuk menarik anggota masyarakat yang saat ini tinggal di perbatasan RI-PNG agar mau kembali menetap di wilayah RI/Irja. Langkah mengembalikan penduduk Irja di perbatasan juga dimaksudkan untuk memutuskan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM.

Langkah terakhir ini diakuinya semata-mata sebagai *tugas kemanusiaan* yang dilakukan Kopassus dalam membantu Pemda dalam memukimkan kembali penduduk yang tinggal di perbatasan tersebut yang tidak memiliki tanah dan hidup tidak sejahtera. Karena upaya yang selama ini ditempuh oleh Pemda tidak membawa kemajuan dimana warga mengambil sikap tidak mau pindah dan menetap di wilayah RI/Irja.

Sewaktu ditanyakan kembali mengenai pendataan penduduk yang dilakukan Anton yang ternyata diketahui oleh anggota Kopassus di Oksibil sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertemuan antara SKP dan Pos Kopassus Oksibil, yang diterangkan kembali oleh komandan Pos Letda Lilik Indarto dalam pertemuan umum tanggal 16 Januari 2002 sebagai *menjalankan perintah atasan di Jayapura*; dijawab bahwa dirinya bersumpah demi Tuhan kalau tidak pernah memberikan perintah demikian baik kepada Anton maupun anak buah di lapangan. Menurutnya, kemungkinan Anton "menipu" anggotanya di Oksibil bahwa kedatangannya dan sensus penduduk merupakan perintah dari komandan Kopassus di Jayapura. Sehingga wajar saja kalau anggotanya nampak melindungi Anton selama berada di Oksibil. Ia mengaku kalau merasa nama baiknya dan nama lembaga dicemarkan Anton; kepercayaan yang diberikan kepada Anton karena kadang mengakui dirinya sebagai "orang besar" di seluruh Oksibil sudah disalahgunakan sehingga Anton akan ditindak sambil memberhentikan hubungan

kerjasama dengan Anton.

Letkol Hartomo menerangkan lebih lanjut mengenai "penyalahgunaan kepercayaan" yang sama sudah dilakukan oleh Paulus Kaladana di Batom yang entah karena takut, sudah hampir 4 bulan tidak berhubungan lagi dengan Kopassus. Disinyalir Paulus masuk hutan kembali. Sejumlah bantuan logistik telah diberikan kepada Paulus untuk menarik masyarakat di perbatasan untuk turun dari hutan diantaranya : Kopassus telah memberi bantuan beras sebanyak 2 ton (dengan pengangkutan melalui pesawat sebanyak 2 kali), bantuan supermi, sardine (ikan kaleng), ikan asin, dan bensin namun akhirnya Paulus terkesan menipu Kopassus. Mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah, bahkan telah meminta bantuan logistik kepada Bupati David Hubi; karena itu Anton juga akan ditindak atas penyalahgunaan kepercayaan tersebut.

Letkol Hartomo mengakui bahwa benar Kopassus bekerja sama dengan mantan OPM seperti Anton dan kawan-kawan karena dianggap telah sadar dan mau berbalik ke pangkuan RI dari kegiatan separatis yang mereka lakukan dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI. Namun apa yang dilakukan Anton, menurutnya sama sekali bukan atas perintah dari Kopassus. Ia menegaskan berulang kali bahwa akan mengambil tindakan terhadap Anton. Juga disampaikan terima kasih atas informasi tentang kegiatan Anton yang disampaikan oleh SKP.

Br. Theo kemudian menjelaskan kasus lainnya yang dilakukan Anton dimana mengancam ke-6 warga akan diculik dan dibunuh oleh Kopassus. Akibat dari ancaman ini sangat berat bagi masyarakat karena menimbulkan ketakutan yang membuat mereka mengambil sikap menyembunyikan diri selama hampir sebulan. Suasana keresahan dilatarbelakangi oleh sejumlah hal berikut :

1. Kedatangan dua anggota Kopassus (Letda Lilik dan Agung) ke rumah Bp. Yohanis Kakyarmabin yang menurutnya ingin meminta "pertanggungjawaban" atas aspirasi masyarakat seputar suasana keamanan di Oksibil yang disampaikan selaku tokoh masyarakat kepada Bupati David Hubi dalam kunjungannya ke Oksibil pada 18 Desember 2001. Sedangkan informasi dari Kopassus, kedatangan mereka ke rumah Yohanis dalam rangka meminta "keterangan". Oleh Yohanis dijawab bahwa pertanggungjawaban bisa diberikan asalkan dilakukan dalam musyawarah besar di lapangan terbuka dan melibatkan semua unsur masyarakat, namun kalau hanya meminta 'keterangan' saja, bisa saja, dan diberikannya.
2. Adapun aspirasi tentang suasana keamanan yang disampaikan berkaitan dengan kehadiran Anton dan aksi pengambilan senjata di Yumakot (suatu tempat yang jauhnya sekitar 7 jam jalan kaki) oleh Kopassus pada 8 November 2001. Senjata tersebut milik Paulus Kaladana yang sudah lama dititipkan kepada seorang warga yang sebenarnya sudah meninggal dunia dan senjata selanjutnya dijaga oleh warga lain yang sama sekali tidak mengetahui tujuan dari penyimpanan senjata

tersebut. Aksi ini menurut kesan masyarakat dilakukan secara sembunyi sehingga masyarakat bertambah sangat ketakutan. Dimana pada hari itu Kopassus menodong dua warga Yumakot untuk menjadi penunjuk jalan dan diinformasikan bahwa tujuan perjalanan adalah untuk pelayanan kesehatan, namun setibanya di lokasi yang dilakukan adalah pengambilan senjata. Kedua warga dimaksud saat ini merasa terancam dan tidak diterima ditengah masyarakat karena dianggap membantu kegiatan Kopassus. Menjadi pertanyaan bahwa, mengapa pengambilan senjata dilakukan dengan kedok pelayanan kesehatan ?

3. Padahal masyarakat sebenarnya membuka diri untuk diajak bicara/koordinasi. Sikap keterbukaan ini ditandai pada saat sosialisasi Kongres Papua 2000 yang dilakukan oleh LMA Ngalum di Oksibil, telah diundang Paulus, Anton dan kawan-kawannya untuk hadir dan menyatakan di depan masyarakat untuk meninggalkan hal-hal yang mudah menimbulkan tindak kekerasan seperti senjata ini. Hal ini menandakan masyarakat benar menunjukkan sikap menolak tindak kekerasan dan sudah tidak ingin lagi mengalami penderitaan seperti dimasa lalu. Apalagi kehidupan mereka telah tenang sejak tahun 1999 disaat diangkatnya kasus pelanggaran HAM di Pegunungan Bintang oleh SKP. Namun undangan tersebut tidak ditanggapi oleh Paulus, Anton, dkk.

Ada tujuan apa dibalik aksi ini ?

Pertanyaan ini dijawab bahwa aksi tersebut merupakan wujud kewajiban militer dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam menjaga keutuhan teritorial. Persoalan semacam ini tidak perlu di-gede-gede-kan. Dasarnya, undang-undang tidak memperbolehkan warga sipil menyimpan senjata. Dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan tugas mulia yang dijalankan Kopassus sehingga mengapa harus dipersalahkan! Hal ini dijawab oleh Br. Theo bahwa pelayanan kesehatan bukan soal bahkan SKP mendukung langkah tersebut termasuk menjalankan perintah undang-undang yang dimaksudkan; namun mengapa terkesan 'menipu' masyarakat sehingga muncul ketakutan?

Jawaban dari Letkol Hartomo, kepura-puraan dalam hal ini adalah strategi agar tidak timbul ketakutan di masyarakat (*pernyataan ini menyiratkan pengakuannya jika laporan masyarakat mengenai pengambilan senjata terbukti benar*).

Diskusi berjalan agak tegang pada bagian ini. SKP tetap meminta transparansi berupa mengajak dialog dengan masyarakat dalam segala kegiatan yang mau dilakukan aparat mengingat masyarakat sendiri menunjukkan sikap terbuka untuk mau bicara dengan siapa saja yang berada di Oksibil. Sikap yang sama ditunjukkan juga oleh Pastor Paroki yang bersedia berdiskusi setiap saat dengan aparat maupun institusi apa saja yang bertugas di OKsibil. Ketakutan yang dirasakan masyarakat merupakan pengalaman penderitaan yang sangat panjang yang akhirnya menciptakan masyarakat yang bisu, selalu curiga dan mudah percaya pada isu-isu. Sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam waktu yang singkat apabila Kopassus ingin memperbaiki

diri dewasa ini. Dibutuhkan kesamaan antara slogan dan konkritisasi di lapangan.

Akhirnya komandan Kopassus ini meminta maaf jika peristiwa tersebut meresahkan masyarakat dan berjanji agar di waktu yang akan datang kebijakan seperti ini akan disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya di tempat. Karena menurutnya kehadiran Kopassus adalah untuk membangun masyarakat, bukan untuk menyakiti.

Ia juga menegaskan menerima permintaan masyarakat untuk tidak lagi mengirim Anton, Paulus dan kawan-kawan mereka ke Oksibil. Sebaliknya SKP menganjurkan agar kelompok tersebut dibiarkan saja hidup di tengah masyarakat dimana saja, yang penting tidak 'dipakai' oleh Kopassus karena telah terbukti hanya menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang sudah hidup tenang.

Sekali lagi Komandan Kopassus mengucapkan terima kasih kepada SKP yang sudah menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja Kopassus dan menanggapi positif atas pertemuan semacam ini. Pihaknya ingin membangun relasi dengan pemimpin agama seperti yang sudah dilakukan dengan ketua-ketua Klasis di lokasi-lokasi dimana Kopassus bertugas. Meminta SKP untuk mengontak pihaknya kapan saja diperlukan.

**KASUS YANG DILAKUKAN KESATUAN KOSTRAD TNI 726 KENDARI
DI KECAMATAN IWUR MARET SAMPAI DENGAN MEI 2002**
(Diketik ulang kembali oleh SKP)

I. KASUS PENGAMBILAN SENJATA DARI MASYARAKAT IWUR OLEH TNI 726 KENDARI DI KECAMATAN IWUR.

- a). Senjata yang diambil dari masyarakat adalah 3 pucuk Lob dan 1 pucuk pistol. Senjata yang dimiliki masyarakat itu biasa dipakai untuk berburu babi hutan dan kuskus jenis besar. Demikian banyak masyarakat mengaku.
- b) Cara pengambilan senjata oleh TNI :
1. Dikumpulkan beberapa masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat seperti guru dan pegawai kecamatan setempat. Mereka dipaksa oleh Danpos, Bpk Inf. La Ode Tadi untuk mengaku bahwa masyarakat benar-benar menyimpan senjata.
 2. Masyarakat yang dikumpulkan diteror, ditodong dengan senjata pistol oleh Dan Pos, disuruh mengaku dan menyerahkan senjata yang menurutnya dimiliki masyarakat, kepada TNI.
- c. Dari mana TNI Pos Iwur mengetahui bahwa masyarakat memiliki senjata ?
1. Keluar masuk ke kampung masyarakat seperti kampung Tirmot, Kuptursbo, Ikolbup, sehingga mereka punya maksud untuk mencari tahu apa saja tentang masyarakat.
 2. Menjual barang kios di kampung-kampung dengan memakai masyarakat sebagai agen pribadi.
 3. Puncaknya adalah TNI mendapat informasi dari seorang pemuda, yakni Yeremias Okesan (primer informan). Titik mulanya, Yeremias ini tangannya dipotong dengan parang oleh seorang Bapak Yemi Bitip karena pemuda ini dituduh telah memperkosa istrinya. Tindakan Yemi Bitip ini tidak diterima baik oleh Yeremias dan perasaan tidak terimanya itu ia lampiaskan kepada Dan Pos (Inf.) La Ode Tadi dengan menceritakan bahwa masyarakat desa Tirmot banyak senjata yang mereka simpan. Kampung Tirmot itu terdapat bengkel senjata..
Sekaligus si pemuda Yeremias memberi informasi kepada Dan Pos bahwa ada sejumlah masyarakat yang ia kenal simpan senjata seperti
 - Deky Korintus Okesan
 - Karolus Karokanjap Yell
 - Gaspar Karonuk Bitip
 - Yames Almum : sebagai produsernya
- Nah, dari informasi itulah, Dan Pos mengumpulkan sejumlah masyarakat dan secara paksa masyarakat ini disuruh mengaku dan

menyerahkan semua senjata yang dimiliki masyarakat kepada TNI setempat.

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

- a. pada tanggal 1 Maret 2002, pada pagi hari, Yeremias Okesan (informan utama bagi TNI) tangannya dopotongoleh Yemi Bitip karena Yeremias dituduh telah memperkosa istri. Masalah ini dibicarakan di Pos TNI Iwur, dan selesai.
- b. Setelah peristiwa itu selesai, beberapa hari kemudian, Yeremias menginformasikan kepada TNI bahwa ada bengkel senjata di Tirmot dan bapak Yames Almum memproduksi senjata. Hasil produksinya itu kini dimiliki oleh beberapa anggota masyarakat seperti :
 - Deki Okesan
 - karolus Yell
 - Gaspar Bitip
 - Yames Almum, sebagai produsernya.

- a. Hari Rabu, tanggal 28 Maret 2002, Dan Pos Iwur, (Inf.) La Ode Tadi, memerintahkan Yeremias untuk pergi mengambil salah satu senjata yang menurutnya sedang disimpan di masyarakat. Dan secara diam-diam si pemuda ini pergi ambil salah satu senjata tapi usaha itu diketahui oleh masyarakat desa Tirmot dan dirampas kembali. Senjata itu milik Gaspar Karonuk.

Peristiwa ini dijalankan oleh Yeremias, setelah sebelumnya si pemuda ini juga berhasil mengambil sebuah peluru dari noken Bapak Urbanus Okesan, bapanya sendiri.

Menurut berita dari masyarakat bahwa si Yeremias ini telah ibayar oleh TNI uang sebanyak 5.500.000 untuk membantu TNI dalam usaha pengambilan senjata dari masyarakat itu. Tapi berita ini tidak jelas, apa benar atau tidak. Saya sendiri belum memastikan. Hanya saja, si Yeremias adalah anak yang makan-minum di pos dan menjadi informan utama.

- b. Hari Kamis 4 April 2002, masyarakat Tirmot dikumpulkan oleh Dan Pos 725 Iwur, jam 9:30 pagi dan membicarakan masalah pembunuhan terhadap seorang bapak (Kuwanem Apyaka) yang ditemukan dalam keadaan busuk di kali Iwur, pada Minggu 24 Maret 2002.

Dalam pembicaraannya, Dan Pos mulai menanyai beberapa masyarakat yang dicurigai sebagai otak pembunuh. Mereka yang dicurigai adalah

- Wilhelmus Ngep
- Stanie Yell
- Dewit Ngep
- Karonuk Gaspas Bitip.

Dalam penyelidikan itu, Dan Pos memeriksa Gaspar Karonuk dengan nada yang agak keras sehingga Gaspar pun menjawabnya dengan nada yang keras. Dan Pos naik pitam dan dengan paksa peserta lainnya disuruh pulang dan hanya 8 orang anggota masyarakat yang ditahan di pos untuk melanjutkan pembicaraannya. Mereka itu adalah

- Yohanis Bleki Kapproka (Kades Tirmot)
- Thomas Okesan
- Gaspar Karonuk Bitip
- Karolus Karokanjap Yell
- Deky Korintus Okesan
- Diktus Oropka
- Alfons Kasipmabin
- Alo Kapropka

Pembicaraan selanjutnya, tidak lagi dibicarakan masalah pembunuhan terhadap Kuwanem, melainkan Dan Pos mengalihkan pembicaraan pokok lainnya, yakni kepentingan Dan Pos dalam pengambilan senjata dari masyarakat Tirmot. Tiga anggota yang ditahan : Gaspar Bitip, Deky Okesan, Karolus Yell langsung ditodong dengan pistol oleh Dan Pos dan mereka disuruh mengaku dan menyerahkan senjata yang disimpan di kampung Tirmot. Anggota TNI lainnya siap siaga mengelilingi masyarakat yang ditahan, diteror dan dipaksa itu. Dan Pos mengancam mereka dengan kata-kata seperti : a) kalau kamu tidak mengaku dan menyangkal, saya akan bunuh b) saya akan kirim kamu ke panglima Jayapura, bila kamu tidak mengaku dan menyerahkan senjata itu c) Kamu jangan menipu bahwa kamu tidak punya senjata, bila menyangkal, saya akan melapor pastor supaya kamu mengaku dan sumpah diatas salib.

Dengan bahasa-bahasa teror dan ancaman ini, masyarakat itu takut dan mengaku bahwa mereka punya senjata. Dan bersama TNI 7 orang masyarakat pergi ke hutan ambil senjata dan menyerahkannya kepada TNI 725 Kendari, yang bertugas di Iwur.

Disampaing itu masyarakat juga takut terhadap ancaman dari Dan Pos dan mengaku kepadanya bahwa yang memproduksi senjata adalah Yames Almum.

PROSES PENGAMBILAN SENJATA SETELAH MASYARAKAT DIPAKSA MENGAKU

Pada hari yang sama, Kamis 4 April 2002, setelah makan siang, rombongan pergi ke hutan, tempat dimana senjata disimpan. Rombongan itu terdiri dari : anggota TNI 7 orang, yang dicurigai pemilik senjata 3 orang, dan saksi 5 orang yakni : Yohanis Kapropka (Kades Tirmot), Alo Kapropka (Kades Iwur), Thomas Okesan (Sekdes Tirmot), Mesak Okesan dan Alfons Kasipmabin

(staf pegawai kecamatan). Pada hari itu TNI berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senjata milik Deky Korintus Okesan. Pengambilan itu terjadi jam dua (2) siang. TNI juga bergambar bersama di tempat dimana senjata itu disimpan.

Setelah senjata diambil dan pulang ke Pos, dua orang anggota masyarakat lainnya yang juga dicurigai sebagai pemilik senjata ditahan di Pos dan bermalam di sana.

Besoknya, Jumat 5 April 2002, 7 anggota TNI bersama sejumlah masyarakat pergi ke hutan, tempat dimana senjata milik Gaspar Bitip dan Karolus Yell disembunyikan. Rombongan yang ikut bersama 7 anggota TNI adalah kedua korban (Gaspar dan Karolus), 2 orang saksi, yakni Egenius Amnyol dan Beny Oropyana. Setelah rombongan sampai di kampung Tirmot, mereka membagi dua rombongan; satu itu kelompok yang pergi mengambil senjatanya Gaspar Karonuk Bitip, dan lainnya pergi mengambil senjatanya Karolus Yell.

Menurut ceritera dari masyarakat, senjata milik Gaspar dapat diambil dengan baik di Jalep (tempat benda itu disembunyikan) dan diri Gaspar tidak diperlakukan secara kasar. Tetapi si Karolus Yell ini dalam proses pengambilannya, ia diperlakukan secara jahat : ia dipaksa juga untuk menyerahkan pelurunya, ditempeleng dua kali, bahkan ancaman pembunuhan "disuruh berdiri diatas sebuah batu yang ada agak jauh dari rombongan supaya anggotanya menembak dengan senjata". Semua kekerasan ini dilakukan terhadap karolus oleh Kopral Imran (operator Pos).

Rombongan Gaspar didalamnya 4 anggota TNI termasuk Dan Pos. Sedangkan rombongan Karolus tiga anggota TNI termasuk Kopral Imran. Dua pucuk senjata, TNI berhasil mengambilnya pada malam dan kembali ke Pos juga tengah malam hari itu.

e) hari Sabtu, 6 April 2002, empat (4) anggota TNI pergi lagi ke kampung Tirmot dan mencari Yames Almum yang dituduh sebagai otak pembuat senjata, atau yang punya bengkel senjata. Karena dirinya dan (Yames) dan keluarga tidak ada di tempat, maka rumah Yames dibongkar untuk mencari peluru dan senjata didalam rumah itu. Namun rupanya mereka tidak menemukan apa-apa didalamnya. Karena takut, Yames dan keluarganya sudah hilang ke PNG.

f) Minggu, 7 April, Dan Pos mengatur anggotanya dan beberapa anggota masyarakat untuk bergambar bersama semua senjata yang diambil.

Prosesnya :

- Dan Pos menyuruh Diktus Oropka (guru honorer) mengambil sebuah meja dari sekolah untuk menyiapkan senjata-senjata itu di atas meja.
- Semua anggota TNI (15) orang berbusana dinas lengkap.
- Sejumlah masyarakat disuruh kepalanya diikat dengan bendera Indonesia. Mereka adalah Alfons Kasipmabin (staf pegawai kecamatan), Yohanis Bleki Kapropka (kepala desa Tirmot), Beny Oropyana, dan Alo Kapropka (Kades Iwur).
- Masyarakat lainnya disuruh pegang anak panah, busur, serta parang. Mereka adalah Gaspar, karolus, dan Deky disb.

Setelah Dan Pos mengatur dan menyiapkan mereka, mereka (TNI) mengambil foto sebanyak empat kali.

g) Dan Pos dan anggotanya berhasil mengambil satu pucuk senjata (sebuah pistol) yang dipegang oleh Kelly Almum. Yang menjadi saksi adalah Alfons Kasipmabin. Tempatnya di sebelah Kali Digul. Hal itu terjadi pada hari Senin 8 April 2002.

h) Nama-nama yang sedang dalam pengejaran TNI :

1. Yames Almum, yang dituduh sebagai produser senjata.
2. Soper Walam
3. Alo Walam
4. Yan Okesan
5. Fidel Okesan

Mereka semua ini hilang dari kampung karena takut terhadap tindakan pengejaran TNI. Ada yang lari ke tetangga PNG dan yang lainnya bersembunyi di hutan.

III. SITUASI MASYARAKAT IWUR DAN TIRMOT SEBELUM DAN SESUDAH PENGAMBILAN SENJATA DARI MASYARAKAT

A. Sebelum Pengambilan Senjata.

Pada umumnya masyarakat itu dekat dengan TNI: hal itu terlihat dari banyaknya anggota masyarakat yang keluar masuk di Pos TNI yang ada di Iwur. Motivasi masyarakat yang keluar masuk di Pos itu bermacam-macam. Ada yang pergi ke Pos karena ingin memperoleh rokok, minuman teh atau kopi, ada yang ingin membeli barang-barang kios yang dijual Pos, yang lainnya dengan maksud hanya jalan-jalan saja, atau juga karena ingin main judi bersama TNI. Motivasi lainnya karena ingin membicarakan persoalan hidup yang dialami di kampung seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan semua pembangunan yang dijalankan pemerintah setempat, bahkan sering juga membicarakan tentang masalah politik Papua. Juga masalah perkelahan antar warga pun dibicarakan di Pos.

Karena bertahun-tahun Camat Iwur tidak berada di tempat, sehingga semua persoalan masyarakat selalu saja dibicarakan di Pos TNI. Nah, dari sikap masyarakat yang demikian, Dan Pos merasa *powernya* terhadap masyarakat amat berpengaruh dan dengan itu dia selalu buat apa saja terhadap masyarakat juga. Dari hubungan yang demikian itu Dan Pos pun membuat agen-agen di kampung untuk menjual barang kios disana. Ia pun bebas keluar masuk ke kampung-kampung terutama di kampung Tirmot.

B. Sesudah Pengambilan Senjata

Pada umumnya, setelah TNI mengambil senjata dari masyarakat dengan cara : ditahan, diteror, ditodong dengan senjata, ditakut-takuti, diancam akan dibunuh,

bahkan dipukul, masyarakat semuanya menjadi takut. Situasi kampung menjadi sunyi. Banyak anggota masyarakat tinggalkan kampung. Bahkan sejumlah masyarakat dikejar hingga kini. Masyarakat tambah takut, karena peristiwa pengambilan senjata itu sudah dilaporkan ke Panglima, bahkan senjatanya sudah dikirim ke pimpinan TNI Jayapura. Disamping itu, Dan Pos (Inf) La Ode Tadi menekan masyarakat bahwa "usaha pengejaran dan pencarian senjata akan diteruskan oleh pengganti kami yang berikut".

Yang akan paling fatal bagi kehidupan masyarakat ke depan adalah bila masyarakat itu mengambil sikap oposisi terhadap TNI setempat tanpa suatu pertimbangan yang matang akan risiko besar atas hidup masyarakat banyak. Sebab ada isu dari masyarakat sendiri bahwa TNI melakukan hal sama (pengambilan senjata secara jahat), masyarakat pun mengambil sikap oposisi terhadap pihak TNI. Sikap ini muncul dari masyarakat sebagai reaksi yang tidak puas dan tidak terima atas semua kekerasan yang dialami dari kesatuan TNI 725 Kendari yang bertugas tahun 2001/2002.

Pengambilan senjata oleh TNI ini jelas-jelas mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Iwur dan Tirmot. Indikasinya adalah ditahan, dipaksa, ditodong dengan senjata, dipukul, diancam akan dibunuh, ditakut-takuti, ditipu. Semua ini dilakukan TNI terhadap masyarakat. Akibatnya hidup masyarakat dalam ketakutan, banyak yang lari dari kampung dan sejumlah kegiatan masyarakat seperti berkebun menjadi macet.

Kelihatannya, pengambilan senjata dari masyarakat ini mengandung beberapa kepentingan. Pertama, kepentingan pangkat Dan Pos dan anggotanya. Sebab setelah pengambilan maupun saat pengambilan senjata, mereka (TNI) bergambar berkali-kali. Ada juga kepentingan politik karena TNI ini bermitra dengan Agus Kapropka (tokoh OPM, asal Iwur) yang bermukim di Yapsi, PNG dan Batom. Dan Pos dan Agus menyatakan opsi tentang siapa yang (O)tonomi dan siapa yang (M)erdeka. Bahkan menegaskan kepada masyarakat bahwa kenapa semua warga kini Otonom dan tidak lagi M.

Kini situasinya menjadi lain setelah pengambilan senjata dari masyarakat. TNI setempat menuduh masyarakat itu melawan TNI dan negara, semua masyarakat kini OPM dlsb.

Masyarakat Iwur dan Tirmot kini menjadi korban dan akan menjadi korban lagi secara rangkap : dari TNI dan dari Agus.

Mengapa ? Agus Kapropka selama beberapa bulan berada di Iwur, sejak November 2001 hingga Maret 2002. Selama di Iwur, Agus dekat dengan TNI. TNI pun tidak berbuat sesuatu yang mengganggu Agus. Mereka menjadi mitra yang baik. Bahkan Agus menyatakan kepada TNI bahwa masyarakat Iwur kini

memilih dan memihak (o)tonom. Dan kepada masyarakat Agus menegaskan, "segala perlengkapan yang ada (mungkin juga alat senjata) yang dimiliki masyarakat, harus dijaga baik. Sebab sudah saya beritahukan kepada Pos bahwa masyarakat semua memihak (o)tonom. Kini, masyarakat diancam TNI bahwa masyarakat rupanya tipu-tipu mendukung O sebab dengan memiliki senjata itu masyarakat mendukung M dan mau melawan TNI dan melawan negara".

Inilah dualisme tekanan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Dan hal ini amat berbahaya bagi hidup masyarakat kini dan terutama ke depan.

Laporan dibuat di
Iwur, 18 Mei 2002

LAPORAN PERISTIWA OKNGUROP KAMPONG YUMAKOT

DESA BULANGKOP, KECAMATAN OKSIBIL

(diketik ulang oleh SKP, Jayapura)

Hari Jumaat, minggu ke-III bulan Mei 2002 JONI BIRDANA anggota TPN/OPM anggota dari PAULUS KALADANA, pimpinan TPN/OPM wilayah Batom Ktwirok membawa sepucuk surat dari TNI KODAM TRIKORA VIII Jayapura, No.: 614/TNI/2001 ke Oksibil.

Perihal surat tersebut inti surat mengatakan ucapan terima kasih dari pihak TNI di Jayapura kepada PAULUS KALADANA cs, Pimpinan TPN/OPM wilayah Batom Ktwirok di Batom, atas penyerahan senjata M16 A1 yang diserahkan oleh Paulus Kaladana kepada pihak TNI / Pangdam Trikora VIII Papua di Jayapura, sekaligus isinya menjawab tanggapan usulan dan proposal Paulus Kaladana kepada pimpinan tertinggi TNI di Jayapura untuk mendapat bantuan berupa beberapa bangunan seperti perumahan sosial dan sejumlah bantuan lain dari pihak TNI kepada masyarakat Pegunungan Bintang, sekaligus dalam isi surat itu juga dimuat tentang ungkapan PAULUS KALADANA cs kepada pihak TNI dan Pemerintah yang mengatakan bahwa penyerahan senjata tersebut adalah merupakan HATI NURANI MASYARAKAT Pegunungan Bintang, namun kalau dilihat secara jeli dan baik maka itu adalah merupakan permainan sandiwara Paulus Kaladana cs saja atas sikapnya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa pada hari Jumaat minggu III bulan Mei 2002 JONI BIRDANA cs, anggota dari Paulus Kaladana sebagai anggota pengungsi yang bertempat tinggal di kompleks bekas perumahan Ingold Oksibil yang berasal dari kampung Yumakot membawa surat Pangdam Trikora ke Oksibil dengan memakai pesawat Merpati MNA perjalanannya menuju kampung Yumakot. Tepatnya pada jam 4.00 sore sampai di kampung Yumakot, setibanya di Yumakot mengumpulkan masyarakat Yumakot, khususnya anggota TPN/OPM dari Paulus K. cs yang berada di kampung tersebut lalu menunjukkan surat dari pimpinan TNI/Pangdam dan membacanya serta dibaca oleh semua anggota lain. setelah surat tersebut diketahui bersama, dan dihibau kepada masyarakat umum di kampung Yumakot bahwa: surat ini isinya menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus merupakan hadiah atau balas jasa dari pimpinan TNI di Jayapura kepada masyarakat Pegunungan Bintang.

Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa ada bantuan nanti dalam waktu dekat berupa 1345 unit perumahan sosial, lokasinya terdiri dari: 1. Batom I, II; 2. Oksip Kecamatan Okbibab; 3. Oksop (DIGUL); 4. Yumakot; 5. Iwur, lokasi tersebut akan dibangun dalam waktu dekat. Setelah menyampaikan hal tersebut, lalu Yoni Birdana mengajak kurang lebih 10 orang anggota masyarakat sebagai

anggota TPN/OPM dari Paulus Kaladana mengambil gambar atau foto di pinggir kali Digul di kampung Yumakot, dengan proses gambarnya adalah bahwa badan tidak memakai baju, hanya memakai celana, badan mereka dihiasi dengan gosok tanah, dan gosok arang dapur di kepalanya memakai bulu kasuari, dilengkapi dengan senjata tradisional (busur dan panah) serta tombak dan memakai sepucuk senapan api lop pabrik serta tulang kasuari lalu dibuat gambar atau difoto. Dan pada hari Sabtu kembali ke Oksibil dan pada hari minggu berangkat kembali melaporkan kegiatannya ke Jayapura dengan menumpang pesawat MNA.

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut Yoni Birdana cs, kembali ke Oksibil dengan memakai Helly kopter Puma milik TNI bersama 3 orang anggota Intel Kodam (1. Abas Kossay bersama 2 orang anggota yang identitasnya tidak kami kenal) tiba di Oksibil pada Sabtu (tanggal 30 Mei 2002). Kegiatan selanjutnya pada malam hari Yoni Birdana dan ABAS KOSSAY berangkat dari Oksibil ke kampung Yumakot, tiba di ibu kota desa Bulankop pada jam 4.00 pagi dan menuju ke Yumakot dan sampai di Yumakot pada jam 5 pagi.

Setelah tiba di kampung Yumakot, dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, antara lain: pantau medan, situasi setempat untuk mendatangkan alat-alat bangunan serta keadaan keamanan apakah terjamin atau tidak untuk pendaratan Hellykopter Puma.

Disampaikan bahwa sarana yang akan didrop dan dibangun adalah sbb.: seperti Puskesmas, Balai Desa, Perumahan guru, makanan berupa gula, garam, supermi, dan sejumlah makan yang akan didrop sebagai bantuan TNI.

Dengan sejumlah rajuan tersebut, dan mengambil 2 pucuk senjata lop buatan Australia, milik anggota TPN/OPM dari anggota Paulus Kaladana cs, di Yumakot, kemudian ABAS KOSSAY dan Yoni Birdana menitipkan 2 pucuk senapan itu kepada 4 orang anggota Paulus K. (Engel Kalakmabin, Hendru Birdana, Epiko Kalakmabin, dan Lasper Kalakmabin) untuk dibawa dari kampung Yumakot ke Mabilabol ibu kota Kecamatan dan sampai di Mabilabol. Pada tanggal 31 Mei 2002 pada hari Minggu dibawa ke Mabilabol untuk selanjutnya ke Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI di Jayapura.

Dengan kegiatan ini reaksi masyarakat khusus kampung Yumakot khususnya dan masyarakat Kecamatan Oksibil pada umumnya merasakan satu tekanan dan keresahan, keresahan dan yang dirasakan diungkapkan dengan berbagai ungkapan seperti:

1. Petugas guru sepanjang Digul Oksop tidak ada koordinasi dan merasa terjepit
2. Ibu-ibu menyatakan ungkapan sikapnya dengan ungkapan bahwa kami tidak setuju dengan cara-cara seperti ini sebab perjuangan Papua

Merdeka kami telah merekomendasikan kepada Dewan Presidium Papua, bahwa "M" adalah harga mati.

3. Bapak-bapak tua mengungkapkan bahwa kami yang berkumis putih menghendaki bahwa berbagai kegiatan atau cara yang dilakukan oleh semua kelompok maupun jalur seperti kargoisme, OPM, Otonomi, Merdeka dan lain-lain kami sudah bosan, jadi kalau mau buat sesuatu yang benar, coba buatlah yang benar, sebab kami sudah korban banyak berupa materi, moril, bahkan sampai nyawa kami, yang mana kalau dilihat baik semuanya ini orang berebut akan tanah dan lingkungan serta kekayaan kami.

Oksibil, Kamis, 4 Juni 2002

**GEREJA KATOLIK PAROKI ROH KUDUS MABILABOL-OKSIBIL
DEKENAT PEG.BINTANG – KEUSKUPAN JAYAPURA**

=====

SURAT PERNYATAAN MENOLAK PAULUS KALADANA CS.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah: para ketua umat dari paroki Roh Kudus Mabilabel.

dengan ini kami menyatakan: mendukung hasil rapat para tokoh sekecamatan Oksibil: Tokoh-tokoh lembaga adat, USPIKA KEC. Oksibil, pimpina pos 725 dan pimpinan gereja Katolik paroki Roh Kudus mabilabel - Oksibil pada tgl. 10 Juni 2002 bertempat di kantor kecamatan Oksibil. Adapun hasil keputusan rapat berupa pernyataan sikap sebagai berikut:


1. Menolak kehadiran kelompok Paulus Kaladana dan para pengikutnya di kecamatan Oksibil bersama dengan senjata api yang dimilikinya.
2. Senjata api milik Paulus Kaladana yang masih di tangan para anggotanya yang tinggal di Yumakot, supaya diserahkan secara terbuka dihadapan semua pihak: Pemerintah, TNI, POLRI, Gereja dan lembaga adat di kecamatan Oksibil.
3. Apabilah saudara Paulus Kaladana dan anggotanya menyerahkan senjata api kepada anggota TNI Cenderwasih yang bermarkas di Jayapura tidak dibenarkan melalui wilayah kecamatan Oksibil.
4. Saudara Paulus Kaladana dan anggotanya dapat menyerahkan senjata api kepada anggota TNI Cenderwasih melalui kecamatan Batom, karena daerah operasi Paulus Kaladana dan anggotanya di wilayah kecamatan Batom.

Surat pernyataan ini kami buat karena telah terjadi dua kali penyerahan senjata api tanpa ada koordinasi dari anggota TNI Cenderwasih dengan Uspika, Pos 725 di Oksibil, Gereja dan tokoh lembaga adat maupun tokoh masyarakat sekecamatan Oksibil, sehingga menimbulkan rasa takut dan resah di tengah masyarakat.

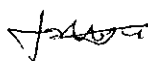
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban seluruh warga masyarakat kecamatan Oksibil.

diputuskan di Oksibil
pada tanggal 12-06-2002


BMK Kabiding


(Permadeta Singsingbin)

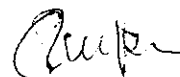
BMK Serapding


(Jack Bonal)

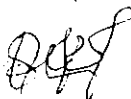
BMK Okdina


(XAVERIUS UROPWABIN)

BMK Okmakot


(Octo Uropwabin)

BMK Okpolbib


(OCTO OBKY)


BMK Yapimakot

(Karel Uropwabin)

BMK Aldom


(Dirlina)

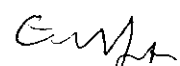
BMK Pepera


(Pasmina)


BMK Bitipkatop


(CHARLES WARYAM)

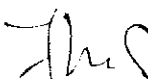
BMK Bulangkop


(Ephiha)

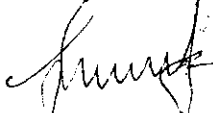
BMK Mabilabol


(Iren)


BMK Yumakot


(Herenias)


BMK Bumbakon


(Anton)

Ketua Dewan Gereja


(Yohana)

Paster Paroki


(P. Willem)

